

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG AKAD MURABAHAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN DANA PENSIUN DI PT. BANK
SYARIAH MANDIRI CABANG PANAKKUKANG MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) Jurusan Ekonomi
Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Uin Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh :

NUR FAUZIYYAH ARISCA

NIM: 90100116024

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fauziyyah Arisca
Nim : 90100116024
Tempat/Tgl. Lahir : Sungguminasa, 19 Januari 1998
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jl. Beringin 1 no.10
Judul : Implementasi Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Murabahah
Pada Produk Pembiayaan Dana Pensiun Di Pt. Bank
Syariah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, November 2020

Penyusun,



Nur Fauziyyah Arisca
NIM: 90100116024



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☐ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa . ☐ 424835, Fax.424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Dana Pensiun Di Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar”** yang disusun oleh **Nur Fauziyyah Arisca**, NIM: **90100116024**, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin tanggal 19 November 2020, bertepatan dengan 4 Rabi’ul Akhir 1442 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Samata-Gowa,

November 2020

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, MM.	(.....)
Penguji I	: Dr. Hj. Rahmawati Muin HS., S.Ag. M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Akramunnas, SE., M.M.	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag
NIP. 1966130 199303 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang senantiasa memberikan rahma dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam tak lupa pula saya kirimkan kepada Nabi Muahammad saw yang telah membawa kita dari alam kebiadaban ke alam yang berperadaban seperti saat sekarang ini, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Skripsi ini berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Dana Pensiun di PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar.

Penyusunan skripsi ini telah terselesaikan berkat adanya bimbingan, petunjuk, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak. Maka tak lupa dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terkhusus kepada:


1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar .
2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

3. Bapak Ahmad Effendi, SE. MM selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Akramunnas, SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag dan bapak Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, MM selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan masukan dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Akramunnas, SE., M.Si dan Ibu Dr. Hj. Rahmawati Muin HS., S.Ag., M.Ag selaku penguji I dan penguji II yang meluangkan waktu dan memberikan arahan sampai skripsi ini selesai.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang membantu dalam kelancaran administrasi
8. Bapak H. Muh Arisa S.Pd dan Ibu Hj. Cambali selaku orang tua tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik saya penuh kasih sayang. Semoga dengan gelar yang nantinya saya dapat mampu menjadi awal untuk membahagiakan ayah dan ibu di dunia dan akhirat.
9. Kepada Fahrul Hidayat terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesabarannya, suport dan dukungannya dari proses awal penyusunan skripsi ini .
10. Kepada teman-teman seperjuangan Equilibrium dan terkhusus kepada Ekonomi Islam 2016 kelas A (EKIS), sebagai entitas keluarga tanpa ikatan darah yang banyak memberikan saya pelajaran dan pengalaman selama di bangku perkuliahan.

11. Kepada senior-senior yang telah sabar memberikan semangat dan arahan sehingga skripsi saya bisa selesai.
12. Kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam (HMJ-EI) UIN Alauddin Makassar periode 2019 yang juga telah menjadi wadah saya berproses untuk belajar menjadi manusia yang profesional, bertanggungjawab, kerja dalam tim, bermusyawarah dengan baik, dan memberikan saya pengalaman yang sangat luar biasa dalam sebuah organisasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan merupakan yang terbaik. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pembaca. Akhir kata *Wallahul muwwafik ilaa aqwamit thariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Samata, November 2020
Penulis


Nur Fauziyyah Arisca
90100116024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11-42
A. Pengertian Akad.....	11
B. Konsep Jual Beli Dalam Islam	19
C. Akad Murabahah	22
D. Pembiayaan	33
E. Dana Pensiun.....	36
F. Kerangka Fikir	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43-48
A. Jenis penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Pendekatan Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Instrument Penelitian	45
G. Teknik Analisis Data	46
H. Pengujian keabsahan Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49-81
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Konsep Fatwa DSN-MUI tentang Akad Murabahah di Perbankan Syariah 	60
C. Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Dana Pensiun	64
BAB V PENUTUP.....	82-83
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84-86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87-107



Abstrak

Nama : NUR FAUZIYYAH ARISCA

NIM : 90100116024

Program Studi : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Dana Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar

Tujuan penelitian yaitu agar mengetahui bagaimana konsep DSN-MUI tentang akad murabahah di Perbankan Syariah dan mengetahui bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah pada produk pembiayaan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan normatif dan deskriptif. Informan dari penelitian ini adalah pegawai Bank, dan nasabah pembiayaan dana pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan mengenai mekanisme pembiayaan pada pensiunan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Panakkukang Kota Makassar yang dilakukan oleh nasabah dengan mengajukan pembiayaan pensiunan beserta berkas yang lengkap kebank, lalu bank mengecek kelengkapan document serta investigasi mengenai kebenaran data. Apabila di setujui bank, bank dapat memberikan surat persetujuan pembiayaan kepada nasabah serta melaksanakan akad. Pencairan dilakukan setelah nasabah memberi tahukan kepada pemberi kerja (PT TASPEN) mengenai pemindahan penyaluran manfaat pensiunan melalui Bank Syariah Mandiri (apabila penyaluran manfaat pensiun melalui bank lain). Penelitian ini dibuktikan melalui implementasi fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah pada produk pembiayaan pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang panakkukang Makassar seharusnya sejalan dalam praktiknya pada perbankan syariah terkait produk-produk yang diberikan kepada nasabah. Namun, pada pratiknya dilapangan sering terjadi pihak bank tidak memahami isu atau muatan dari fatwa dan juga masih sangat minimnya pengetahuan pelaku ekonomi syariah tentang fatwa DSN-MUI.

Kata Kunci: Implementasi, akad Murabahah, Produk

ABSTRACT

Name : Nur Fauziyyah Arisca
NIM : 90100116024
Study Program : Islamic Economics
Thesis Title : Implementation of the DSN-MUI Fatwa Regarding the Murabahah Contract on Pension Fund Financing Products at PT. Mandiri Sharia Bank Branch Panakkukang Makassar.

The research objectives are to find out how the DSN-MUI concept regarding the murabahah contract in Islamic Banking and to know how the implementation of the DSN-MUI fatwa regarding the murabahah contract on pension fund financing products at Bank Syariah Mandiri Panakkukang Branch Makassar.

This type of research used qualitative with a normative and descriptive approach. The informants of this study were bank employees and pension fund financing customers at PT. Bank Syariah Mandiri Branch Panakkukang Makassar.

The results showed that the financing mechanism for retirees at PT. Bank Syariah Mandiri Panakkukang Branch Makassar City can be done by customers who apply for pension financing along with the completeness of the files to the bank, then the bank checks the completeness of the documents and investigates the accuracy of the data. If approved by the bank, the customer is given a financing approval letter and executes the contract. Disbursements are made after the customer notifies the employer (PT TASPEN) regarding the transfer of retirement benefits through Bank Syariah Mandiri (if the distribution of pension benefits is through another bank). This study also found evidence that the implementation of the DSN-MUI fatwa regarding the murabahah contract on pension financing products at PT. Bank Syariah Mandiri Branch Panakkukang Makassar should be in line with the practice of Islamic banking regarding the products provided to customers. However, in practice in the field it often happens that banks do not understand the issues or contents of the fatwa and there is also very little knowledge of Islamic economic actors about the DSN-MUI fatwa.

Keywords: Implementation, Murabahah Agreement, Products

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia pada tahun 70 – 80an, saling berlomba dalam memasuki dunia kepegawaian negara atau PNS salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan tunjangan di hari tua. Tunjangan akan diperoleh apabila telah mencapai masa kerja yang mana menurut mereka masa tersebut sudah tidak dikatakan sebagai masa produktif. Untuk itulah mengapa masyarakat di era 70-80an berlomba-lomba ingin bekerja sebagai PNS.

Diera 70-80an perusahaan kebanyakan belum menyediakan dana tunjangan, dan baru diterapkan ditahun 90an. Ditambah dengan dikeluarkannya UU Nomor 11 Tahun 1992 yang diatur mengenai Dana Pensiun. Hingga saat ini, semua perusahaan sudah menyediakan dana tunjangan untuk pegawainya. Adapun perusahaan dengan tidak menyediakan dana tunjangan, namun memiliki alternative untuk memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mendapatkan dana tunjangan melalui lembaga-lembaga yang bersangkutan. Dana tunjangan diberikan agar karyawan dapat lebih giat lagi dalam bekerja.¹

Dana tunjangan diberlakukan tidak lain adalah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat yang heterogen dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan seperti risiko kecelakaan dan risiko meninggal dunia. Hal tersebut

¹Marifah Yuliani, “Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah”, *Dinamika penelitian: Media Komunikais Sosial Keagamaan*, Vol. 17, No. 2, November 2017, h.222

apabila terjadi, akan berdampak pada finansial para pegawai dan pada akhirnya akan berisiko bagi kelangsungan hidupnya.²

Indonesia merupakan negara dengan penduduk ber-agama muslim terbesar di dunia, sehingga terdapat banyak aktivitas perekonomian syariah yang berkembang di negara ini. Salah satunya adalah investasi. Investasi yang sesuai dengan syari'at islam bukan berpatokan pada biaya, produk, risiko serta keuntungan saja, melainkan juga disesuaikan dengan prinsip syariah. Perkembangan ekonomi syariah menjadikan banyaknya lembaga keuangan yang menciptakan produk-produk baru seperti halnya dana pensiun syariah.³

Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia beberapa tahun terakhir meningkat secara signifikan. OJK mengeluarkan Laporan perkembangan Keuangan Syariah periode 2016, yang memperlihatkan pertumbuhan aset, DPK dan PYD yang meliputi UUS (Bank Umum Syari'ah) serta BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dengan pertumbuhan aset 20,28 %, 16,41 % serta 20,84 %.⁴

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap operasional perbankan syari'ah tentunya tidak lepas dari daya tarik sistem keuangan Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral yang mengutamakan keadilan, perdagangan yang adil, kesamaan. Keunggulan ini tercermin dalam prinsip utama

²Puspita Dewi Wulaningrum, Asirotn Nisa, "Praktik Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri", Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Vol.1, No.1, h. 34

³Ninda Nashiha Hudaefa, "Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Minat Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Pensiun di BSM Kc Ajibarang Banyumas", Skripsi (Purwokerto, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Purwokerto, 2019), h.2

⁴Maya Indriastuti, Ririh Dian Pratiwi, "Perbandingan Pembiayaan Bermasalah Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional", jurnal Akuntansi, Vol. 6 No.1, h.933

perbankan syariah yang bebas riba dan menerapkan sistem bagi hasil. Riba berarti pendapatan diterima lebih dari nilai dasar atau nilai sebenarnya baik dalam pinjaman atau pertukan komoditas yang berdampak pada ketidakadilan bahkan eksploitasi bagi orang-orang yang membutuhkan dana. Riba ini diterapkan pada bank konvensional dalam bentuk bunga. Sedangkan pada bank syariah, sistem bunga dihapuskan dan diganti menjadi sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dirasa lebih adil bagi seluruh kalangan masyarakat baik bagi pemilik kelebihan dana maupun bagi yang membutuhkan dana. Prinsip inilah yang selalu dijadikan sebagai landasan perbankan syariah mengembangkan produk-produknya.⁵

Produk perbankan syariah dengan System murabahah dapat sesuai pada usaha mengumpulkan dana/funding atau menyalurkan dana/financial. Salah satu produk pembiayaan berbasis syariah yang cukup banyak diminati adalah produk murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli komoditas tertentu yaitu penjual menjelaskan kepada pembeli tentang harga jual yang terdiri dari harga perolehan dan margin (keuntungan) yang diambil penjual kemudian pembeli menyetujuinya harga jual tersebut. Konsep murabahah secara sederhana merupakan bentuk jual beli yang ditambah dengan komisi atau suatu bentuk penjualan barang dengan harga awal barang ditambahkan dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.⁶

⁵Muhammad Tho'in," Larangan Riba dalam Teks dan Konteks", jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 2, No.2, juli, 2016, h.64

⁶Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia", jurnal Hukum Vol.16, No.1, Januari, 2009, h.108

Adanya regulasi tentang pembiayaan murabahah yaitu Fathwa Dewan Syari'ah National (DSN) Majelist Ulama Indonesia (MUI) No:04 / DSN-MUI / IV/2000 mengenai keuntungan dalam pembiyaan murobahah diperbankan syari'ah serta PSAK102 Revisii 2013 mengenai accounting murobahah yang dijadikan panduan dalam melaksanakan pembiayan morabahah dan pandun pencatatan, pengukuran, pengakuan, penyajian dan mengungkapkan transaksii pembiayaan murobahah menjadi penguat bagi bank maupun bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk perbankan syariah berbasis murabahah. Terdapat banyak produk murabahah yang berkembang, pembiayaan pension misalnya. Dana pension bagi negara maju beeguna dalam menjamin pendapatan minimum dimasa mendatang.⁷

Di Indonesia sendiri, dana tunjangan digunakan untuk menyisihkan pendapatan pegawai untuk investasi masa depan. Karyawan yang telah berakhir masa kerjanya akan menerima dana secara bertahap dan bagi karyaan yang telah meninggal dunia, dana tersebut akan diberikan kepada ahli warisnya hal inilah yang disebut sebagai manfaat pensiun. Sehingga pembiayaan pensiun adalah pembiayaan yang berpotensi untuk peningkatan ekonomi mayarakat mandiri maupun yang sudah tidak produktif lagi.⁸

Program dana tunjangan untuk PNS di atur melalui UU No. 43 Tahun 1999 pasal 10 mengenai tunjangan dimasa tua sebagai penghargaan bagi PNS yang sudah

⁷Sepky Mardian,” Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol.3, No.1, 2015, h.60

⁸Dina Maisyaroh,” Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Mengajukan Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru”, Vol.2, No.1, Mei, 2019, h.41

mengabdikan diri nya selama beberapa tahun untuk negara. Adapun UU No. 11 Tahun 1992 yang mengatur tentang dana tunjangan untuk pegawai non PNS.⁹

Lembaga penghimpun dana dibutuhkan ketika pegawai yang telah pension ingin menggunakan dana tersebut untuk modal usaha maupun dalam memenuhi kebutuhannya. Perbankan syariah di Indonesia seperti Bank Syariah Mandiri mulai melirik lembaga penghimpun dana untuk penyaluran dana pensiun yang sesuai dengan syariat islam berbasis murabahah.¹⁰

Bank Syariah Mandiri memiliki data dimana khusus untuk pembiayaan pensiun berbasis murabahah, Bank Syariah Mandiri pada tahun 2016 mencapai Rp 1,44 triliun yang menandakan pertumbuhan sebanyak 165%. Adapun sampai desember, jumlah pensiun yang melakukan penyaluran pensiun mencapai 13.447 orang atau 130% dibandingkan tahun 2015 yang hanya 5.854. hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat akan produk pembiayaan pensiun berbasis murabahah dari Bank Syariah Mandiri semakin meningkat.¹¹

Bank Syariah Mandiri merupakan sistem dan menawarkan produk pembiayaan berbasis syariah yang sama di seluruh kantor cabangnya. Oleh karena itu, seluruh outlet BSM diindonesia memiliki fitur-fitur yang serupa dalam penerapan dan produknya, termasuk Bank Syariah Mandiri Cabang Panakkukang.

⁹Dina Maisyaroh,” Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Mengajukan Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru”, Vol.2, No.1, Mei, 2019, h.42

¹⁰Riska Indahsari, Yuni Rosdiana, Rini Lestari,” Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Organisasi Pada Lembaga Perbankan Syariah di Kota Bandung”, Vol.19,No.1, Maret, 2018, h.39.

¹¹Syifa Hanifah, 2017, “ Pembiayaan Pensiun Bsm” <https://www.merdeka.com/uang/2016-pembiayaan-pensiun-syariah-bsm-capai-rp-144-triliun.html>

Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami mekanism product pembiyaan pensiun di BSM cabang panakukkang dan mengetahui kesesuaian penerapan akad murobahah terhadap product pembiyaan pension dengan Fathwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) MUI (Majelist Ulama Indonesia) No : 04 / DSN MUI / IV / 2000 mengenai ketetapan dalam pembiyaan murobahah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin melakukn penelitian yang berjudul **“Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Dana Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar”**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar dapat memudahkan dan memahami pembaca mengenai isi penelitian serta menghindari adanya kesalah-pahaman untuk mengevisienkan waktudan biaya maka peneliti memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu mengfokuskan penelitian terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Implementasi fathwa DSN-MUI tentang akad murabahah terhadap product pembiayaan dana pensiun
- b. Bagian pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri dan objeknya ialah nasabah yang mengetahui langsung prosedur yang dijalankan

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah di perbankan syariah ?

2. Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah pada produk pembiayaan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dari penelitian tersebut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana konsep DSN-MUI tentang akad murabahah di Perbankan Syariah.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah pada produk pembiayaan dana pensiun di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Di harapkan bisa memberikan pemahaman dan wawasan kepada pembaca dan penulis tentang akad murobahah dan penerapannya pada product pembiayaan pension
 - b. Diharapkan dapat menambah informasi khususnya pada Bank Syari'ah Kantor Cabang Panakkukang Makassar dalam menerapkan akad muamalat di productnya khususnya penerapan akad murobahah pada product pembiayaan pensiun.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, dipaparkan juga beberapa kajian pustaka atau hasil penelitian terdahulu agar dapat memudahkan para peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang dibahas dalam penelitiannya

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

No	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Firdaniatul Musarofah (2017)	Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang Banyumas Jawa Tengah	Dalam penelitian tersebut, memberikan hasil bahwa dalam mengimplementasikan akad murobahah dalam pembiayaan pensionan terdapat kesesuaian dalam Fathwa DSN MUI. Pada penerapan akad murobahah tentu terdapat permasalahan yang berasal pada calon nasabah/konsumen take over. Namun dalam pembiayaan pensionan, diPT. Bank Syari'ah Mandiri KC Ajibarang Banyumas Jawa Tengah terdapat kesesuaian akad yang sudah ditentukan ialah akad murobahah
2.	Khairiyah (2018)	Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura.	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah dalam hal pengadaan objek yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor

			<p>Cabang Martapura sesuai dengan teori tentang murabahah yang terdapat pada teori fiqh kontemporer dan memenuhi salah satu syarat dari jual-beli yaitu barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan pada setelah akad, barang yang dijual pada saat akad sudah sepenuhnya milik Bank hal tersebut dapat dilihat dari proses pencairan dana yang dilakukan setelah proses akad antara Bank dan Nasabah. Penerapan gaji nasabah yang tidak bisa pindah ke Bank Syariah Mandiri dan nasabah yang menunda untuk membayar angsuran baik karena sengaja maupun karena mengalami masalah keuangan telah sesuai dengan teori tentang murabahah</p>
3.	Idawati (2018)	Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pensiunan di PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Kendari.	Menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah pada produk Pembiayaan Pensiunan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 poin ke 4 Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank dan pembelian harus

			<p>sah dan bebas riba dan poin ke 9 jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank juga tidak terpenuhinya rukun jual beli pada poin ke 4 obyek ialah pemilik penuh yang melakukan akad. Karena dana tidak dapat dicairkan sebelum penandatanganan akad dilakukan oleh nasabah</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab aqad diartikan sebagai kewajiban, ikatan terhadap suatu hal yang diperjanjikan. Maksudnya ialah membuat suatu kontrak perjanjian/persetujuan. Dalam hokum Islam, perjanjian/akad ialah sesuatu yang dengan sengaja dilakukan oleh individu ataupun kelompok lainnya yang telah disetujui bersama. Sehingga dapat dikatakan bahwa akad ialah perjanjian antara dua oran atau lebih yang diawali dengan ijab dan diakhiri dengan Kabul yang ssuai dengan syariat islam.

Akad menurut Ahmad Azhar Basyir merupakan suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan akibat-akibat hukum. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, dan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan dalam suatu akad.¹²

2. Prinsip - Prinsip Akad

Secara umum prinsip (asas) akad terdiri dari beberapa bagian diantaranya:¹³

¹² Darmawati H, *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah*, jurnal sulesana, Vol.XII, No.2, 2018, h.145

¹³ Muhammad Harfin Zuhdi, *Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*, jurnal Ekonomi Syariah, Vol.VIII, No.2, Juni 2017, h.94

a. Mabda' Al- Tuhid (Asas Ilahiyah)

Azas ilahiyaht atau mabda' al-thauhid ialah pedoman utama bagi manusia dalam melakukan aktivitas muamalah, karena didalamnya terdapat prinsip agama, kebenaran, ilmu, kesatuan alam raya dan lain sebagainya yang didasari pada hakekat Tauhid. Tauhid bersifat transenden karena memiliki unsur religious, namun tetap memiliki unsur materi karena mengingat manusia sebagai fitrahnya menginginkan sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhannya agar sejahtera sehingga tercapai masalah bagi dirinya dan orang-orang disekitarnya.

b. Mabda' Al- Ibadah (Asas Kebolehan)

Azas kebolehan atau al-Ibahah ialah asas yang terdapat dalam hokum islam yang memiliki cakupan luas mengenai muamalah untuk menciptakan peluang/kesempatan dalam melahirkan suatu kreatifitas baru yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Dalam konteks bermuamalah segala sesuatunya dapat dilakukan namun tetap pada prinsipnya yaitu sesuai dengan syariat islam.

c. Mabda' Al-Adalah (Asas Keadilan)

Azas keadilan ialah asas yang paling penting dalam perakad-an. Keadilan merupakan suatu bentuk komitmen yang harus ditegakkan. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang membahas mengenai keadilan. Terdapat 2/3 ayat yang menurut Ali Syariati membahas mengenai pentingnya dalam menegakkan suatu keadilan dan membenci kedzholiman.

Berbicara mengenai kedzholiman, sehingga segala sesuatu yang merujuk pada kedzholiman merupakan suatu hal yang tidak dibolehkan dalam syariat.

Contohnya dalam aktivitas muamalah, ketika seseorang berhutang lalu si pemberi pinjaman mengharuskan bahwa segala jaminan yang digunakan sebagai objek, dihilangkan atau hangus sehingga nilai dari jaminan tersebut lebih besar dari sisa hutang hal ini biasa disebut dengan eksekusi jaminan atas hutang. Timbullah tindak kedzholiman dalam aktivitas muamalah ini, karena apabila si peminjam telat membayar hutangnya maka jaminan tersebut akan menjadi milik si pemberi pinjaman. Dalam aktivitas pembiayaan konvensional praktek muamalah ini sering digunakan, untuk itu bagi usaha-usaha yang bergerak dibidang multifinance atau pembiayaan syariah hendaknya menerapkan asas keadilan dalam melakukan aktivitas ekonominya.

d. Mabda' Al-Musawa (Asas Persamaan atau Kesenjajaran)

Setiap manusia dimuka bumi ini berbeda-beda, ada kaya adapula yang miskin dengan berbagai jenis suku, agama, gender, bahasa dan status social. Hal ini tidak lain ialah sunatulloh. Sehingga adapun mereka yang memiliki harta berlebih ataupun serba kekurangan, hal tersebut telah menjadi ketentuan yang maha kuasa. Untuk itu penting bagi manusia untuk melakukan kegiatan muamalah karena manusia pada fitrahnya adalah makhluk social untuk saling membantu dan melengkapi satu sama lain, agar dapat menciptakan kesejahteraan diantara anggota masyarakat. Sama halnya dengan perjanjian/akad, yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya sehingga hal-hal yang berkaitan dengan eksploitasi, dominasi ataupun kedzholiman harus ditiadakan.

e. Mabda' Al-Shihq (Asas Kejujuran dan Kebenaran)

Kejujuran ialah suatu hal yang paling penting karena menyangkut tentang kebenaran. Kejujuran dan kebenaran tidak dapat dipisahkan karena akan diberlakukan dalam suatu akad. Apabila konsep ini hilang dalam perikatan maka perjanjian/akad akan rusak sehingga kemudian akan menimbulkan kerugian dan perselisihan diantara dua belah pihak.

f. Asas Tertulis (*Mabda' al-Kitabah*)

Dalam melakukan suatu akad perjanjian perlu adanya alat bukti agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari, dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan mengenai pentingnya perjanjian secara tertulis dengan adanya saksi yang menyaksikannya. Selain perjanjian secara tertulis, perjanjian yang dilakukan hendaknya secara tunai agar di pegang sebagai jaminan.

g. Asas Kepercayaan (*Mabda' al-Amanah*)

Amanah berarti segala apa yang disampaikan serta dititipkan kepada penerima amanah agar hati tenang tanpa khawatir sama sekali. Subtansi amanah adalah kepercayaan yang diberikan orang lain kepadanya sehingga menimbulkan ketenangan jiwa. Keterkaitan antara akad dan asas amanah ialah supaya akid yang melakukan suatu perjanjian/akad tidak melakukan suatu hal yang merugikan salah satu pihak.

h. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan (*Mabda' al-Mashlahah*)

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun

tidak terdapat ketentuannya dalam Al-qur'an dan Al-had is. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum islam secara universal.

3. Jenis - Jenis Akad

Jenis akad terbagi menjadi dua bagian, yaitu :¹⁴

a. Akad Tabarru'

Tabarru ialah akad tolong-menolong yang diniatkan untuk pahala dan ridho kepada Allah tanpa memikirkan adanya keuntungan. Akad ini berkaitan dengan akad wakalah, hibah, kafalah, rahn hiwalah dan qiradh, yang menurut kata akad tabarru' ialah sesuatu yang diperjanjikan tanpa adanya margin karena akad ini tidak mengandung unsur komersial didalamnya.

b. Akad Tijarah

Akad ini ialah akad yang dalam pelaksanaannya mengharuskan adanya margin namun rukun dan syaratnya tetap sesuai dengan syariat. Contoh akad ini seperti salam, istishan, murabahah, mudharabah dan *ijarah muntahiyah bittamlik* serta *Musyarakah*. Atau dalam kata lain, akad tijarah ialah segala sesuatu yang diperjanjikan dengan mengharapkan adanya imbalan.

4. Rukun dan Syarat

¹⁴Nofinawati, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, Vol.VIII, No.2, Juli-Desember 2014, h.221

Terdapat 5 rukun dan syarat dalam pelaksanaan suatu akad menurut jumhur ulama, selain Mazhab Hanafi:¹⁵

- a. 'Aqidun, pelaku akad, yang terdiri atas individu ataupun sejumlah pihak dan beberapa pihak tertentu.
- b. Mahallul 'aqdi, ialah objek dalam akad jual beli.
- c. Maudhu'ul'aqdi, ialah maksud dan tujuan dari suatu akad. Contohnya terdapat hak milik dalam jual beli melalui pembayaran.
- d. Ijab atau sighat'aqdi, ialah ungkapan keinginan untuk melaksanakan suatu akad.
- e. Qabul yaitu ialah ungkapan persetujuan dalam melaksanakan suatu akad.

Adapun 7 syarat akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy ialah sebagai berikut:¹⁶

- a. *Ahliyatul 'aqdiyaini*, pihak-pihak yang terlibat dalam akad haruslah cakap dalam bertindak.
- b. *Qabiliyyatul mahallil 'aqdili hukmihi*, objek akad dapat diterima secara hukum.
- c. *Al-wilayatul syar'iyah fi maudu'I*, pihak yang melakukan akad memiliki hak sekalipun tidak bertindak *aqid*

¹⁵ Wardah Yuspini, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*, jurnal Ilmu Hukum, Vol.X, No.1, Maret 2007, h.57

¹⁶ Ramli Semmawi, *Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam*, jurnal Al-Syir'ah, Vol.8, No.2, Desember 2010, h. 507

- d. *Anlayakunal 'aqdu au mauu'uhu mamnu'an bi al-nash al-syar'iyin*. Pihak-pihak yang berakad tidak menjadikan objek akad sebagai objek yang dilarang dalam syariat.
- e. Terdapat manfaat dalam suatu akad tanpa adanya kerugian yang dapat merusak akad.
- f. Ijab dapat terlaksana dan tidak berakhir sebelum adanya qobul.
- g. menurut syarfi'i, pihak-pihak yang berakad harus berada dalam satu majelis akad

5. Hal - Hal Yang Membatalkan Akad

Adapun hal yang membatalkan akad terdiri dari beberapa bagian, yakni:¹⁷

a. Paksaan (*ikrah*)

Ikra atau paksaan adalah cacat yang terjadi pada keridlaan. Prinsip menghilangkan kesukarelaan yang terjadi dalam akad dapat mejadi tidak sah. Paksaan merutut Fuqaha, ialah suatu perbuatan yang dilakukan bukan karena keinginannya dan tidak memiliki pilihan untuk berhenti melakukan perbuatan tersebut. Paksaan terdiri dari dua, menurut para fuqaha yaitu paksaan penuh, ialah perbuatan yang harus dilakukan seseorang dan pertaruhanannya adalah nyawa atau keselamatan jiwa, sdangkan paksaan tidak sempurna ialah suatu perbuatan yang tidak menyangkut pada keselakatan jiwa seeorang.

b. Kekeliruan (*ghalat*)

¹⁷ Ahmad Danu Syaputra, *Cederanya Akad/Perjanjian Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, jurnal Syariah, Vol.V, No.1, April 2017, h.113

Kesalahan dalam melakukan suatu perjanjian dalam akad dapat menjadikan akad tersebut batal. Seperti terjadinya ketidaksesuaian dalam objek akad misalnya yang harus dihadirkan adalah meja, namun yang dibawa ialah kursi. Apabila yang salah adalah objek akadnya maka dari awal akad sudah batal, namun apabila yang salah adalah sifat akad maka akad masih sah namun apabila terdapat salah satu pihak yang rugi maka akad dapat dibatalkan.

c. Tipuan (*taghrir*)

Penipuan adalah tindakan memalsukan kecacatan dalam objek akad sehingga tidak diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat sehingga terjadi keuntungan sepihak. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy aib yang terdapat dalam akad terjadi karena ada sebabnya. Seperti menjual kambing perahan, supaya air susunya deras padahal tidak pernah diperah selama beberapa hari. Ketentuan apabila ketahuan melakukan hal tersebut, maka menurut Chairuman salah satu pihak dapat membatalkan akad. Terdapat hadis hukum penipuan menurut para fuqaha mazhab Syafi'i, hanbali, dan Maliki ialah: "Tidak termasuk Umatku seorang penipu" (HR. Jama'ah kecuali Nasa'i).

d. Tipu Muslihat (*ghubn*)

Apabila salah satu pihak yang berakad memaksa agar pihak lainnya berbohong agar dapat memikat para konsumen, maka menurut fiqaha pihak yang berbohong tersebut dapat merusak akad.

B. Konsep Jual Beli dan Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa jualbeli ialah transaksi yang dilakukn atas dasar sukasama suka ssuai syari'at islam. Adapun jual beli/murobahah menurut ulama hanafitah ialah pertukaran harta dengan harta yang diperbolehkan dalam agama islam. Sedangkan ibnu Qudamah menyatakan jual beli ialah proses transaksi agar mendapatkan hakatas benda tersebut. Adapun pengertian jual beli oleh malikiyah ialah suatu hal yang bersifat kebutuhan yan dimanfaatkan dan dinikmati.

Syaikh Muhammed bin Qasim Al-Ghazy menyatakan jual beli merupakan pemberian hak kepemilikan atas barang disertai manfaat atas barang tersebut yang diperbolehkan.¹⁸ Jual beli terdapat unsur tabarru yang memiliki pedoman dalam alqur'an dan hadits. Adapun ayat yang memiliki kaitan dengan jualbeli ialah (QS An-Nisa/1: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2. Rukun jual beli(Murabahah)

¹⁸Supriadi, “*Penetapan standar harga jual beli dalam konsep Ekonomi islam* “, Skripsi (Makassar:Fak.Ekonomi dan Bisnis Islam, 2013), h.11

Hanafi mengatakan jual beli/murabahah ialah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia karena ketergantungan manusia terhadap apa yang dibutuhkannya. Sedangkan rukun menurut ahli fiqh ialah segala hal yang menjadi pedoman dan dapat diterima oleh logika. Rukun-rukun dalam jual beli ialah:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Ijab qabul
- d. Barang yang di perjual belikan

3. Syarat jual beli

Syarat ialah hal-hal yang terdapat dalam jual beli dengan tujuan agar tidak terjadi persengketaan dan pihak-pihak yang terlibat terhindar dari kerugian dan manipulasi.

- a. Syarat penjual dan pembeli (pelaku akad)
 - 1) Pihak yang berakad ialah mumayiz, dan tidak sah dilakukan oleh anak kecil dan orang mabuk.
 - 2) Tidak dalam paksaan
 - 3) Telah bhaligh.
 - 4) Tidak menghambur-hamburkan harta.
- b. Syarat ijab (serah terima)

Anak-anak yang ingin melakukan jual beli sah apabila ia telah mumayiz hal ini berdasarkan pendapat hanafi, maliki dan hambani. Sedangkan menurut syafi'i hal tersebut tetap tidak sah.

- 1) Qobul harus sesuai dengan ijab
- 2) Produsen dapat menyesuaikan keinginan pembeli
- 3) Proses akad dilaksanakan dalam satu majlis.

- 4) Qobul harus diucapkan setelah ijabh dan tidak dipisahkan satu dengan yang lain.

c. Syarat barang (objek) yang diperjualbelikan

- 1) Benda diperjual belikan harus terdapat produsen dan konsumen disertai zat, keadaan barang, sifat bentuk serta kadarnya supaya tidak terdapat kesalahpahaman.
- 2) Benda tersebut ialah bernilai. Sesuatu yang bernilai merupakan kepuasan setiap orang, sehingga dapat dbutuhkan dan dimanfaatkan.
- 3) Barang tersebut dapat diberikan kepada pembeli setelah adanya proses transaksi.¹⁹

4. Larangan jual Beli khomar

Jual beli ialah segala kegiatan atau aktivitas yang dianjurkan manusia membutuhkan sistem jual beli untuk memenuhi kebutuhanya. Nabi Muhammad SAW juga melakukan kegiatan jual beli, yan mana penjual mendapatkan fee melalui hasil barang yangdijual, akan tetapi keuntungan harus sesuai dan tidak berlebihan karena hal tersebut bisa menurujuk keperbuatan riba. Penghalalan Allah mengenai jual beli itu mengandung 2 makna, salah satunya adalah Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh 2 orang pada barang yang diperoleh untuk memperjual belikan berdasarkan suka sama suka. Kedua Allah menghalalkan praktek jual beli jika barang tersebut tidak di larang oleh Allah SWT, yang memilki otoritas dalam memberitahukan mengenai sesuatu yang telah dikehendaki-NYA.

¹⁹Rabiatul Adwiah, "Sistem jual beli obat golongan psikotropika narkotika dan precursor menurut perspektif Islam", Skripsi (Makassar: Fak.Ekonomi dan Bisnis Islam 2017), h. 18.

C. Akad Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murahabah darisegi bahasa ialah akar kata bahasa arab *Ribh* yang berarti keuntungan.²⁰ Secara umum murabahah ialah product yang dijual sesuai price product tersebut dengan keuntungan sesuai perjanjian. Jadi secara singkat murabahah adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Menurut Wahbah al-Zuhaili murabahah ialah proses transaksi antara dua pihak sesuai harga yang sebenarnya beserta keuntungannya.²¹ Yang mana, produsen memberitahukan harga asli kepada konsumen disertai keuntungan yang diinginkannya.

Menurut Ibnu Rusyd menyatakan murobahah ialah transaksi jual beli product yang secara terang-terangan memberitahukan harga jualnya beserta keuntungan.²² Jual beli/murabahah dalam hal ini, produsen diharuskan mengatakan secara jujur harga productnya serta keuntungan yang diinginkan.

Terdapat keuntungan sesuai kehendak masing-masing pihak, ciri-ciri murabahah ialah produsen hendaknya memberitahu konsumen mengenai harga

²⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet.10, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) H. 98

²¹ Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muammalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) H. 208

²² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) H. 101

pembelian barang dengan pernyataan jumlah keuntungan di tambahkan biaya tersebut.²³ Contohnya sifulana menawarkan unta tiga puluh dinar, pengeluarannya lima dinar, sehingga saat menawarkan untanya, ia menyatakan “sy jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.”

2. Landasan Syariah

a. Al-Quran

(QS. Al-Baqarah 2/275) :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ


Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba padahal Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan Tuhan-Nya, lalu dia berhenti maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah”.²⁴

(Q.S At-Taubah: 9/111)

²³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. 10, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) H. 113

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung:Al-Mizan Publishing House,2014)h.48


 إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ
 وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
 بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur’an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual-beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung.”²⁵

b. Al-Hadist

Melalui Suhaib ar-Rummi r.a. yang mana Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk di jual” (HR. Ibnu Majah)²⁶

c. Syarat Murabahah

- 1) Nasabah mengetahui biaya modal penjual
- 2) Sesuai rukun, kontak diawal harus sah
- 3) Terbebas dari riba
- 4) Transparan mengenai produk yang dijual
- 5) Transparan dalam hal pembelian, contohnya barang dilakukan secara utang.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung:Al-Mizan Publishing House,2014)h.59

²⁶ M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) H. 115

Apabila syarat terhadap ketentuan 1, 4 serta 5 tidak dilakukan, konsumen berhak memilih untuk:

- Tetap melakukan pembelian
- Mengembalikan kepada konsumen karena tidak sesuai dengan keinginannya
- Kontrak batal

3. Beberapa Ketentuan Umum

a. Jaminan

Dalam murabahah, jaminan tidak harus selalu ada. Adanya jaminan supaya pihak yang terlibat serius melakukan murabahah. Konsumen/pembeli mensyaratkan jaminan ke pemesan sebagai pegangan. Dalam konteksnya barang jaminan dapat digunakan untuk membayar utang.

b. Utang dalam murabahah

Dalam murabahah tidak terdapat kaitan antara transaksi lain selain dengan pihak pertama dalam menyelesaikan hutang sipemesan baik ingin menjualnya kembali dengan keuntungan yang diinginkannya, sipemesan masih memiliki kewajiban dalam penyelesaian hutangnya dengan pihak pertama.

Apabila pemesan melakukan jual beli dan belum habis masa angsurannya, maka ia tidak berkewajiban membayar semua angsurannya. Apabila dalam penjualan tersebut rugi maka itu diperbolehkan, misalnya apabila nasabah seorang produsen, konsumen/pemesan maka pinjamannya harus diselesaikan oleh

sipedagang. Hal tersebut dikarenakan, transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga ialah akad terpisah.

c. Penundaan pembayaran oleh debitor mampu

Nasabah/konsumen yang memiliki keuangan yang baik tidak diperbolehkan menunda-nunda hutangnya. Apabila ia menunda maka hal ni dapat diselsaikan melalui jalur hokum agat uangggnuu kembali dan kerugian-kerugian lain akibat menunda hutangnya.

Rasulullah saw. Dalam riwayat mngatakan pengutang yan apabila sseorang dapat membayarnya namun lalai, “manusia lalai dalam membayar utangnya sementara dia bisa membayarnya, maka akan terkena sanksidan namanya tercemar”.

d. Bangkrut

Apabila pemesan berhutang bukan karena pelit namun karena ketidaksanggupannya, maka krditor diharuskan melakukan penundaan untuk menagih hutang sampai ipeminjam ini dapat membayarnya kembali. Allah SWT telah berfirman dalam (Q.S Al-Baqarah/280) :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. dan jika kamu meyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”²⁷

4. Jenis-Jenis Murabahah

a. Murobahah non pesanan

Murobahah non pesanan, ialah dalam membeli barang penjual tidak harus melihat ada tidaknya yang dipesan oleh pembeli, karena walaupun tidak ada barang harus disediakan oleh bank syariah.²⁸ Dalam menentukan asset murobahah yaitu melalui biaya perolehan mana yang bisa direalisasikan, apabila rendah maka dikatakan rugi.

b. Murobahah dengan pesanan

Murobahah dengan pesanan, ialah murobahah apabila terdapat nasabah yang ingin memesan barang pihak bank menyediakan barang tersebut. Sehingga transaksi ini mengikat nasabah dan nasabah harus menyerahkan sebagian uang dari harga yang diberikan. Contohnya apabila terdapat pesanan maka penjual akan mencari barang yang dibutuhkan oleh konsumen, yang mana kinsmen harus memberikan sebagian uangnya sebagai uang muka.²⁹ Transaksi ini bersifat mengikat, sehingga konsumen tidak boleh membatalkan pesannya.

5. Landasan hukum positif pembiayaan murabahah

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung:Al-Mizan Publishing House,2014)h.48

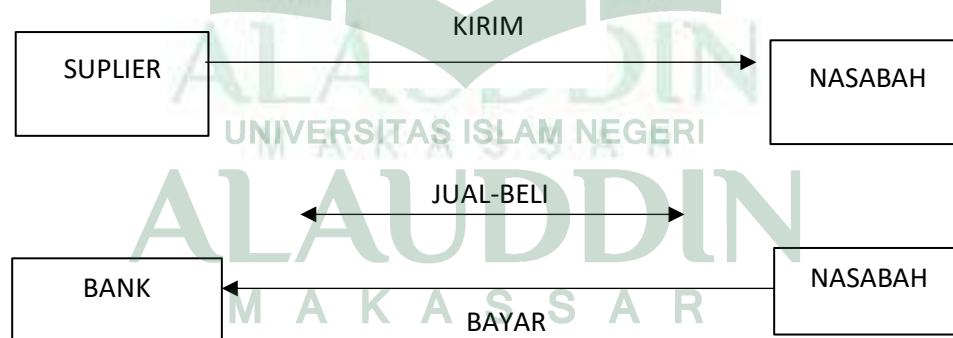
²⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet.10, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) H. 115

²⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet.10, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) H. 117

Transaksi murabahah di atur melalui pasal 1 angka 13 UU No.10 Tahun 1998 mengenai perubahan UU No.7 Tahun 1992 menyangkut perbankan³⁰. Adapun secara khusus diatur dalam UU No.21 Tahun 2009 mengenai perbankan syariah, ialah pasal 19 ayat 1 berisi mengenai kegiatan usaha bank umum syariah yang terdiri dari: mendistribusikan atas dasar akad murabahah, istishna, salam, serta akad lainnya sesuai syariat Islam.³¹

Adapun Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang mengatur mengenai pembiayaan murabahah, perbankan syariah haruslah mempunyai fasilitas yang mendukung kebutuhan masyarakat misalnya dalam penjualan barang produsen harus transparan mengenai harga beli ditambah keuntungan yang diinginkan.

6. Skema Murabahah



7. Ketentuan Umum Murabahah dalam Fatwa DSN-MUI

³⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 105

³¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 106

a. Pengertian Fatwa

Fatwa ialah segala sesuatu yang tidak ada pedanannya, yang kemudian diperjelas oleh mujtahid, ahli hokum fiqih atau mufti untuk menghindari permasalahan atau kesalahpahaman dalam suatu masyarakat mengenai hukum islam.

b. Kedudukan Fatwa

Fatwa dalam suatu institusi bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan jawaban mengenai permasalahannya. Fatwa sering dijadikan sebagai rujukan dalam bertindak. Fatwa mengikat bagi individu yang membutuhkan dan bagi pihak pemberi fatwa. Fatwa dalam ekonomi syariah diatur oleh DSN-MUI. Fatwa bersifat independen karena DSN-MUI tidak masuk dalam structural bank sentral dan diakui kedudukannya apabila menyangkut mengenai solusi dalam permasalahan yang berkaitan dengan perbankan.

c. Sifat Fatwa

Perkembangan keuangan syariah tidak lepas dari peran fatwa yang memberikan solusi serta menjadi tolak ukur dalam memajukan keuangan syariah diindonesia. Terdapat hal-hal penting yang perlu diketahui yaitu:

- 1) Fathwa yang sifatnya restponsive, ialah jawaban suatu hukum yang disebarluaskan pada saat terdapat pertanyaan atau permintaan fathwa. Pada umumnya fathwa disebarluaskan untuk menjawab pertanyaan mengenai peristiwa atau kasus yang sudah terjadi dan nyata.

- 2) Secara hukum, fatwa tidak mengikat jawaban hukum. Sehingga baik itu mustafti, individu, masyarakat ataupun lembaga boleh mengikuti ataupun tidak isi dari hukum fatwa tersebut, karena pada dasarnya fatwa tidak bersifat mengikat, tetapi jika fatwa tersebut diambil dari keputusan pengadilan, barulah kemudian terikat oleh hukum tersebut, terlebih jika diikat oleh hukum positif dan harus diterapkan dalam suatu negara.

d. Proses Penetapan Fatwa DSN

Tugas DSN dalam perbankan syariah ialah menetapkan hukum yang tidak ada pedanya dalam al-qur'an dan hadis baik itu kegiatannya, produknya ataupun jasa-jasa yang diberikan. Hal tersebut dilakukan dengan mengadakan rapat pleno diikuti anggota-anggota DSN, BI dan lembaga-lembaga lainnya seperti bank, pasar modal, asuransi dll.

Ketentuan umum mengenai pembiayaan murabahah termaktub pada Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 ialah:³²

a. Ketentuan umum murabahah

- 1) Akad murabahah yang terjadi antarbank dan nasabah haruslah terbebas dari riba'.
- 2) Product tersebut dibolehkan dalam syariat islam
- 3) Harga awal untuk membeli barang tersebut menjadi tanggung jawab bank baik dibayar secara bertahap ataupun seluruhnya.

³² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)h. 108

- 4) Pembelian barang oleh bank harus atas nama bank dan sah secara hukum dan terbebas dari riba
- 5) Jika barang yang dibeli secara kredit maka bank harus transparan kepada nasabah dalam hal pembelian
- 6) Perbankan lalu menawarkan product yang dipesan tersebut oleh nasabah/konsumen seharga barang ditambah keuntungan. Bank diharuskan menerangkan harga asli barang tersebut ditambah biaya-biaya lainnya.
- 7) Konsumen mampu membayar product tersebut sesuai ketentuan waktu yang ditentukan.
- 8) Dalam menghindari batalnya akad, pihak perbankan harus melakukan kesepakatan dengan nasabah/konsumen.
- 9) Apabila bank menyuruh nasabah untuk diwakli, maka jual beli dilakukan setelah barang dan telah menjadi bank.

b. Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah

- 1) Nasabah membuat permohonan untuk membeli barang melalui bank.
- 2) Apabila perbankan menyetujui permohonan yang diajukan, sehingga bank diharuskan membeli lebih dulu pesanan secara sah melalui pemasok.
- 3) Bank lalu memberikan tawaran pada nasabah/konsumen dan harus membeli barang tersebut sesuai kesepakatan sehingga akan mengikat bank dan nasabah dalam suatu kontrak.
- 4) Bank bisa menerima jaminan dari nasabah ditujukan agar nasabah/konsumen serius melakukan akad.

- 5) Apabila nasabah tidak jadi membelinya, maka ganti ruginya melalui uang muka dari nasabah.
- 6) Apabila kerugian tersebut lebih tinggi dari uang muka, maka bank dapat meminta tambahan kepada nasabah
- 7) Adanya jaminan dilakukan sebagai tanda keseriusan nasabah terhadap barang yang dipesannya.
- 8) Utang nasabah/konsumen pada akad murobahah tidak ada hubungannya dengan pihak ketiga. Apabila nasabah/konsumen ingin menjual barang yang belum lunas, nasabah tetap memiliki kewajiban untuk membayar hutang barang tersebut dan tidak harus langsung melunasinya.

c. Penundaan Pembayaran dalam murabahah

Apabila nasabah mampu membayar hutangnya namun sengaja menundanya maka hal tersebut akan diselesaikan di badan arbitrase syariah apabila tidak menemukan solusi dalam musyawarah³³.

d. Bangkrut dalam murabahah

Apabila nasabah terbukti pailit dalam penyelesaian hutangnya, maka bank dapat menundanya sampai nasabah sanggup membayarnya kembali.

³³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 109

Selain ketentuan umum diatas terkait murabahah, juga harus diperhatikan fatwa-fatwa lain yang membahas seputar murabahah. Diantaranya adalah, sebagai berikut³⁴:

- 1) Fathwa DSN-MUI Nomor : 13/ DSN-MUI /IX / 2000 mengenai panjar dalam murabahah.
- 2) Fathwa DSN-MUI Nomor : 16/ DSN-MUI /IX / 2000 mengenai Discount dalam murabahah
- 3) Fathwa DSN-MUI Nomor : 17/ DSN-MUI /IX / 2000 mengenai sanksi yang diberikan bagi nasabah/konsumen tidak mau membayar hutangnya
- 4) Fathwa DSN-MUI Nomor : 23/ DSN-MUI / III / 2002 mengenai pemetongan bagi yang melunasi hutangnya dalam murobahah
- 5) Fathwa DSN-MUI Nomor : 43/ DSN-MUI /VIII / 2004 mengenai thawidh
- 6) Fathwa DSN-MUI Nomor : 46/ DSN-MUI /II / 2005 mengenai pemetongantagihan murabahah
- 7) Fathwa DSN-MUI Nomor : 47/ DSN-MUI /II / 2005 mengenai menyelesaikan hutang nasabah yang kurang mampu.
- 8) Fathwa DSN-MUI Nomor : 48/ DSN-MUI /II / 2005 mengenai jadwal tagihan murobahah
- 9) Fathwa DSN-MUI Nomor : 49/ DSN-MUI /II / 2005 mengenai pemindahan akad murobahah

D. Pembiayaan

³⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)h. 110

Pembiayaan dewasa ini berkembang secara signifikan, perkembangan tersebut dapat menimbulkan risiko yang erat kaitannya dengan mechanism pembiayaan.³⁵ Penghasilan perbankan merupakan hasil distribusi pembiayaan.

Dalam pasal 1 Ayat 12 UU No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, dijelaskan bahwa pembiayaan/financing syari'ah ialah³⁶ : “tersedianya dana/uang dan tagihan dianggap sama melalui persetujuan antara berbagai pihak dan menjadikan pihak yang di biyai harus melunasi pinjaman sesuai kesepakatan yang telah ditentukan bersama.”

Pada prinsipnya pembiayaan ialah finan dengan mengeluarkan dana untuk diinvestasikan dalam suatu usaha.³⁷ Pembiayaan dapat dikatakan sebagai kredit yang biasa diterapkan perbankan konvensional. Yang beda hanyalah jenis imbalannya. Imbalan ialah bagi hasil/murobahah sementara credit ialah bunga/return. Pembiayaan dan kredit ialah salah satu saluran dana/uang diperbankan.

1. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan ialah dapat membuka lapangan kerja agar tercapai kesejahteraan ekonomi. Pembiayaan dapat dilakukan oleh berbagai bidang usaha

³⁵ Mustika Rimadhani dan Osni Erza, *analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri periode 2008.01-2011.12*, media ekonomi Vol.19, No.1, April 2011, h.31

³⁶ Mustika Rimadhani dan Osni Erza, *analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri periode 2008.01-2011.12*, media ekonomi Vol.19, No.1, April 2011, h.33

³⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002)H.102

seperti pertanian, industry serta perdagangan dalam meningkatkan kesempatan kerja berikut produksi, distribusi serta jasa dalam pemenuhan ekonomi ekspor luar negeri.³⁸

Pembiayaan mikro terdiri atas 2 tujuan, yaitu:³⁹

a. Pembiayaan macro

Tujuan pembiayaan makro:

- 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat yang sulit mengakses finansial keuanannya. Dapat dengan mudah melndapatkannya melalui pembiayaan.
- 2) Masyarakat dapat meningkatkan kegiatan usahanya. Dalam mengembangkan usaha perlu adanya dana, maka dalam hal ini, dana dapat di peroleh dari aktifitas pembiayaan.
- 3) Peningkatan produktivitas. Dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan produksinya.
- 4) Tersedianya lapangan pekerjaan. Apabila terdapat banyak perusahaan baru, maka tingkat pengangguran dapat diminimalisir karena perusahaan butuh pekerja
- 5) Pedapatan dapat terdistribusi. Masyarakat yang produktif berarti aktif dalam memperoleh pendapatan, sehingga penghasilan dapat terdistribusi.

³⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002)H.103

³⁹ Mustika Rimadhani dan Osni Erza, *analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri periode 2008.01-2011.12*, media ekonomi Vol.19, No.1, April 2011, h.35

b. Secara mikro

Pembiayaan secara mikro bertujuan untuk:

- 1) Dapat meningkatkan keuntungan. Dalam menjalankan suatu usaha perlu adanya modal agar memperoleh laba yang maksimal.
- 2) Risiko dapat diminimalisir. Agar mendapatkan penghasilan yang tinggi maka perusahaan harus meminimalisir timbulnya risiko. Hal ini dapat dilakukan melalui pembiayaan.
- 3) Memberdayakan SDM. Dalam mengembangkan SDM dapat dilakukan dengan me-mix antara sda, sdm dan sumber daya modal, apabila sda dan sdm nya tersedia namun modalnya tidak, maka pembiayaan diperlukan.
- 4) Penyaluran dana yang berlebih. Pembiayaan dapat menjembatani masyarakat yang memerlukan biaya melalui penyedia dana

E. Dana Pensiun

1. Pengertian Dana Pensiun

Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan UU Nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, Dana Pensiun adalah “Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.”⁴⁰

⁴⁰ Dina Maisyaroh, *Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah mengajukan pembiayaan pensiun di pt.bank syariah mandiri area pekanbaru*, Jurnal Tabarru: Islamic and Finance Vol.2, No.1, Mei 2019, h.42

Tugas perusahaan dana pensiun ialah mengumpulkan dana iuran melalui hasil perolehan gajinya yang dikurangi, kemudian sisanya diinvestasikan melalui kegiatan-kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan.

2. Landasan Hukum Dana pensiun

Dalam DPLK, tidak terdapat peraturan mengenai manfaat dana tunjangan, melainkan hanya mengatur mengenai besaran iuran saja karena dalam pelaksanaannya dana yang diterima harus sesuai dengan peningkatan investasi setiap tahun, hal ini mengakibatkan tidak pastinya keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, maka pihak yang mengelola harus pintar-pintar dalam optimalisasi return dari penggunaan dana. Hal inilah yang disebut dengan murabahah/bagi hasil. Bagi hasil ialah usaha yang dilakukan dalam memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan.⁴¹

Terdapat Bunga dalam suatu kegiatan muamalah apabila keuntungan yang diperoleh ditetapkan lebih dulu. Bunga/riba tidak diperbolehkan dalam syariat islam sesuai firman Allah (QS. Ar-rum/39):

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahannya :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan tanpa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh

⁴¹ Ahmad Faisol, dkk, *Pengembangan Sistem Informasi Dana Pensiun Pegawai Pada PT.Taspen Kantor Cabang Jember*, Bytes, Vol.1, No.1, 2012, h.5

keridhoan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahala)⁴².

Sehingga jika bunga ditetapkan diawal, maka hal tersebut dikatakan mendahului takhdir. Karena yang meminjam seolah-olah mendapat untung dan pemberi pinjaman merasa bahwa ia benar-benar mampu dalam membayarnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Tujuan Dana Pensiun

Pnyelenggaraan dana pension dapat diketahui melalui 2 sampai 3 pihak yang terlibat aktif⁴³. Apabila terdapat 2 pihak saja itu artinya yang terlibat ialah pemberi kerja dan pegawainya. Adapun pihak ketiga, ialah pegawai, pemberi kerja serta lembaga pengelola dana pension dengan tujuan yan berbeda-beda.

a. Bagi perusahaan atau pemberi kerja

Dana pension memiliki beberapa tujuan untuk pemberi kerja, yaitu:

- 1) Penghargaan diberikan oleh pegawai yang sudah bekerja diperusahaan tersebut.
- 2) Manfaatnya bagi pegawai ialah dapat memanfaatkan dana pension setelah berhenti bekerja.
- 3) Dapat menumbuhkan ketentraman atau rasa aman
- 4) Dapat memotivasi pegawai untuk giat dalam bekerja.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung:Al-Mizan Publishing House,2014)h. 40

⁴³ Hayuningtyas Pramesti Dewi dan Fenny Dewi Lestari, *Akuntansi Dana Pensiun Program Manfaat Pasti Terhadap Laporan Keuangan Studi Pada Dana Pensiun Bank Indonesia*, Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol.03.No.01, Januari, 2016, h.5

5) Dapat menciptakan image yang baik perusahaan dimata orang serta pemerinth.

6) Wajib secara moral

b. Bagi peserta/pegawai

Tujuan dana pension untuk pegawai/peserta yaitu:

- 1) Mendapatkan penghasilan diusia tua
- 2) Menumbuhkan rasa aman sehingga mmotivasinya untuk lebih giat dalam bekerja
- 3) Hasil pemberian yang baik

c. Menyelenggarakan dana pension

Tujuan dana pension untuk penyelenggara dana pension, yaitu:

- 1) Mendapatkan keuntungan melalui hasil pengelolaan dana pension
- 2) Ikut membantu pemerintah dalam menseahterakan masyarakat
- 3) Salah satu bentuk bakti social

4. Fungsi Dana Pensiun

Program pension memiliki tiga fungsi, yaitu berfungsi sebagai tabungn, asuransi dan tunjangan hari tua⁴⁴. Program pensiun sebagai dana asuransi dapat membantu nasabah dengan jaminan yang diberikan dalam menghadapi risiko yang akan terjadi dimasa depan seperti kematian ataupun sakit diusia tua. Program pensiun tabungan ialah tunjangan yang diberikan kepada pegawai sebaai hasil dari

⁴⁴ Andika F.P Nussy, *Analisis Penerapan PSAK NO. 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado*, Jurnal Emba Vol.2, Vol.4 Desember, 2014 h. 443

iuran yang dibayar selama kerja. Program dana tunjangan, ialah dana yang didapatkan pegawai secara bertahap yaitu:

a. Fungsi Asuransi

Terdapat asas kebersamaan dalam program pension. Misalnya ketika nasabah mengalami risiko kecelekaan ataupun meninggal dunia sehingga merugikan finansialnya,⁴⁵ maka sebelum ia sampai pada masa pensionnya, nasabah tersebut mendapatkan dana senilai risiko yang diperjanjikan.

b. Fungsi Tabungan

Tugas lembaga keuangan dana pension ialah melakukan pengumpulan dan pengembangan dana, sehingga hasil dari pengembangan tersebut digunakan sebagai iuran peserta dan disimpan sebagai tabungan⁴⁶. Hasil tersebut, nantinya akan dipergunakan sebagai dana tunjangan/pension. Dana pension peserta besarnya ditentukan berdasarkan:

- 1) Mengakumulasikan premi yang sudah disetor
- 2) Rentang waktu peserta membayar iuran
- 3) Besaran hasil pengelolaan dana

⁴⁵ Andika F.P Nussy, *Analisis Penerapan PSAK NO. 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado*, Jurnal Emba Vol.2, Vol.4 Desember, 2014 h. 445

⁴⁶ Ayu Hapsari Budi Utami, dkk, *Penggunaan Metode projected unit credit dan entry age normal dalam pembiayaan pensiun*, Jurnal Gaussian, Vol.1, No.1, 2012. Hal 49

Misalnya, ketika peserta berhenti, maka akan diberikan dana yang sesuai dengan iura yang telah disetorkannya melalui dana pensiun. Dilakukannya hal tersebut agar terjaga liquiditas dana/uang pension selama waktu yang ditentukan.

c. Fungsi pensiun

Diselenggarakannya program dana pension ialah sebagai asas dalam menunda manfaat dana tunjangan. Asas penundaan manfaat pension, dimana peserta akan mendapatkan dana tunjangan secara berkala selama dia hidup dan telah pension.⁴⁷ terdapat 4 cara dalam membayar dana pension, ialah:

- 1) Pensiun normal, dimana peserta akan membayar hak pension karena telah sampai pada masa usia pensinn normal.
- 2) Pensiun dipercepat, peserta akan membayar hak pension selama kurang lebih sepuluh tahun sebelum sampai pada masa usia pension normal.
- 3) Pensiun ditunda, apabila peserta berhnti kerja selama kurang lebih tigga tahun dan belum pension maka pembayarannya pun ditunda.
- 4) Pensiun cacat, ialah iuran yang dibayar peserta penderita cacat yan diakibatkan kecelakaan saat bekerja.

5. Jenis-Jenis Dana Pensiun

Dalam UU No. 11 Tahun 1992 terdapat macam-macam dana/tunjangan pension, ialah:

a. DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja)

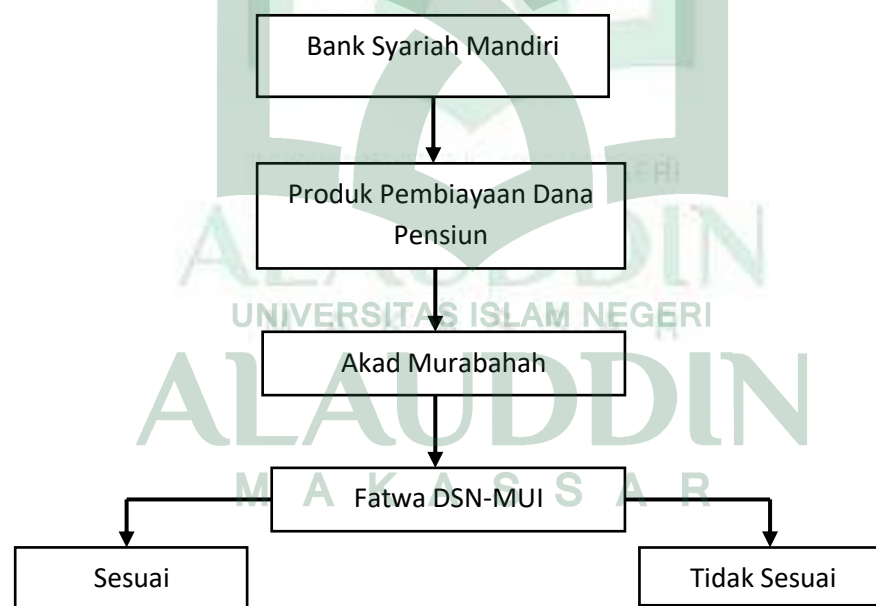
⁴⁷ Ayu Hapsari Budi Utami, dkk, *Penggunaan Metode projected unit credit dan entry age normal dalam pembiayaan pensiun*, Jurnal Gaussian, Vol.1, No.1, 2012. Hal 51

DPPK ialah tunjangan terbentuk oleh individu dan lembaga yang memperkerjakan karyawan untuk diberi tunjangan guna dapat memberikan manfaat baik kelangsungan hidup karyawannya.⁴⁸ Oleh karena itu, adanya DPPK ini dapat bermanfaat bagi perusahaan yang menyediakan langsung tunjangannya . DPPK diharuskan untuk memperoleh pengesahan melalui Menteri Keuangan.

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

DPLK ialah tunjangan yang terbentuk melalui perbankan ataupun asuransi jiwa dalam mengadakan program dana tunjangan oleh tiap individu yang bekerja baik tergolong dalam DPLK ataupun tidak.⁴⁹

F. Kerangka Pikir



⁴⁸ Novita Ratna Satiti, *Optimalisasi Portofolio Investasi Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Malang*, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol.3,No.1,2013, h. 76

⁴⁹ Novita Ratna Satiti, *Optimalisasi Portofolio Investasi Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Malang*, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol.3,No.1,2013, h. 78

Bank Syariah Mandiri ialah lembaga keuangan syariah yang memiliki produk pembiayaan dana pensiun . Bank Syariah Mandiri itu sendiri memadukan pembiayaan pensiun dengan berbasis akad murabahah . Adapun regulasi terkait pembiayaan murabahah yaitu Fatwa DSN MUI mengenai keuntungan umum pembiayaan murabahah. Adanya regulasi Fatwa DSN-MUI mengenai akad murabahah ini melihat bagaimanaproduk pembiayaan dana pensiun di Bank Syariah sesuai atau tidak terhadap mekanismeyang dijalankan .



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif ialah penelitian dengan menyelidiki berbagai fenomena social agar mendapat pemahaman dari penelitian yang dilakukan. Adapun landasan theory digunakan sebagai panduan dalam penelitian agar sesuai dengan hal-hal yang ada di lapangan. Lebih dari itu, landasan theory digunakan sebagai gambaran mengenai latarbelakang penelitian dan untuk membahas hasil penelitian.⁵⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif ialah penelitian dengan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang ingin diteliti kemudian ditulis dan dijelaskan untuk menyimpulkan analisisnya.⁵¹

Deskriptif kualitatif ialah analisis data dengan menjelaskan dan menguraikan data ataupun informasi yang sesuai dengan theory dan didukung dengan permasalahan yang ingin diteliti secara relevan, dengan penggunaan method kualitatif agar mendapat kesimpulan dari penelitian yang diteliti

⁵⁰ Mudrajat Kuncoro. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Ed.3.* (Jakarta: Erlangga, 2009). h.145

⁵¹ Winarno Surahmat. *Dasar dan Teknik Riset.* (Bandung: Tarsito, 1998). h.132

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar, dan menjadikan bagian pembiayaan Bank Syariah Mandiri dan Nasabah sebagai objek penelitian.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian di penelitian ini ialah pendekatan deskriptif analitis. Ialah penelitian dengan memecahkan masalah yang ditemui melalui fakta/kenyataan dimasa sekarang dan pemusatan permasalahan pada penelitian yang akan diteliti.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Didalam penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah kualitatif dengan mengambil data langsung lapangan

2. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang didapat dari informasi melalui wawancara narasumber.

Dalam hal ini adalah bagian pembiayaan dan nasabah yang terlibat langsung didalamnya.

b. Data sekunder ialah kumpulan informasi yang dilakukan peneliti melalui informan yang berhubungan pada objek penelitian, seperti artikel, buku serta karya ilmiah lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang valid dan jelas, penulis/peneliti menggunakan metode ialah :

1. Survei pustaka ialah prolehan hasil informasi dengan korelasinya terhadap masalah yang diteliti baik itu dibuku, theory, hasil seminar, jurnal ataupun skripsi yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini
2. Observasi ialah mengumpulkan informasi dengan melakukan observsi langsung terhadap object penelitian. Tujuannya ialah guna memperoleh informasi umum mengenai implementasi akad murabahah pada pembiayaan pensiun.
3. Wawancara ialah method mengumpulkan data/informasi melalui narasumber, dengan bentuk wawancara langsung dan tidak langsung.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penlitian ialah sesuatu hal yang penting didalam penelitian, tujuannya ialah penentuan berhasilnya penelitian yang dilakukan dan berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan informasi. Sehingga dalam hal ini, harus terdapat kesesuaian dengan kondisi penelitian ini. Alat-alat yang digunakan ialah:

1. Handphone

Handphone menjadi alat bantu agar tidak ada informasi yang terlewat, selain mampu menjadi alat yang mempermudah untuk melakukan wawancara tidak langsung juga sebagai salah satu cara untuk mempermudah hasil-hasil wawancara tanpa harus mencatat. Handphone juga mampu menjadi alat bantu perekam saat melakukan sesi wawancara langsung terhadap narasumber, dari rekaman tersebut yang nantinya juga akan lebih mempermudah peneliti saat harus memutar ulang isi rekaman agar isi dari wawancara menjadi data yang utuh. Peneliti menggunakan alat rekam dan memanfaatkan *handphone* sebagai perangkat agar mengetahui gambaran dari situasi

ataupun keadaan ketika melakukan wawancara serta jawaban yang diberikan oleh narasumber.

2. Kamera

Camera dipakai sebagai alat dalam membantu suatu penelitian. Camera tersebut dijadikan sebagai alat dokumentasi seperti foto dalam penelitian

3. Pedoman Wawancara

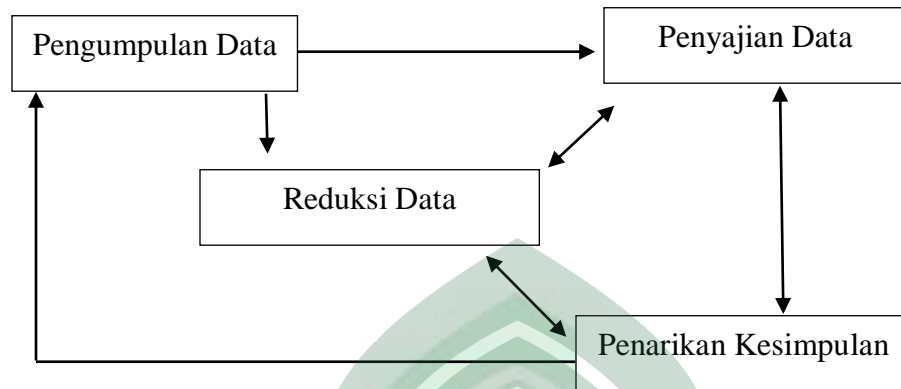
Pedoman wawancara dapat membantu penelitian yang berfungsi sebagai pengingat tentang hal-hal yang berkaitan dengan jawaban-jawaban responden. Pedoman wawancara digunakan agar peneliti dapat dengan mudah mengkategorikan analisis- analisis data/informasi. Pedoman wawancara harus berdasarkan pada theory agar terhindar dari hal-hal yang menyimpang dalam suatu penelitian.

G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman terdapat beberapa tahap-tahap dalam menganalisis data. Berkaitan dengan penelitian ini, tahap-tahapnya ialah:



Gambar 3.1
Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman



1. Mengumpulkan informasi dengan mengamati secara langsung. kemudian wawancara mendalam terhadap narasumber yang *compatible* terhadap penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan. Ataupun dengan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.
2. Mereduksi data/informasi ialah agar dapat memusatkan suatu informasi yang diperoleh ketika mengumpulkan data/infoemasi dan memilih mana yang akan digunakan.
3. Penyajian data ialah pengumpulan data/informasi kedalam text narrative dan gravik dengan tujuan agar data tersebut dipertajam dan dapat diuraikan.
4. Terakhir ialah memberikan kesimpulan yang harus cermat dalam memberikan hasil dari tinjauan dari data/informasi yang diperoleh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah descriptive kualitatif ialah analisa informasi/datayang

diuraikan melalui theory serta konsep yang didukung oleh theory yang relevan, yang selanjutnya diberikan kesimpulan.

H. Pengujian Keabsahan Data

Guna mendapatkan kesimpulan yang relevan didalam penelitian, sehingga diperlukan dukungan informasi/data yang valid dan sesuai. Tingkat kepercayaan memberikan gambaran yang sesuai dengan penelitian dan sasarannya. Adapun langkah-langkah dalam mendapatkan kepercayaan, yaitu:

1. Peneliti ikut serta dalam mengumpulkan data/informasi
2. Melakukan pengecekan kessuaian data/informasi, yaitu dengan membandingkan data/informasi yang diperoleh melalui informan lainnya.

Data/informasi yang didapat melalui narasumber harus di teliti keabsahannya dengan membandingkan data/informasi dengan data yang didapatkan melalui narasumber lainnya. Kebenaran data didalam penelitian kali ini dilakukan yaitu menggunakan theknik triangulasi, ialah theknik dalam menilai kecocokan data/informasi dengan memanfaatkan sesuatu diluadata tersebut dalam mengecek perbandingan data/informasi tersebut.

Theknik triangulasi yang di gunakan ialah theory, data, method, dan peneliti. Theknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik triangulasi sumber data, ialah data/informasi yang didapat melalui narasumber yaitu: *bagian pembiayaan dan nasabah bank syariah mandiri cabang panakkukang.*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Hadirnya BSM pada tahun 1999, ialah hikmah yang berkah saat krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada Juli 1997, kemudian terjadi pula krisis multidimensional di era politik nasional yang memberikan berbagai dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat hingga berdampak pada dunia usaha. Hal ini juga dialami oleh industri perbankan konvensional yang terus mengalami penurunan, hal yang dilakukan pemerintah akhirnya melakukan restrukturisasi serta rekapitulasi beberapa bank di Indonesia.⁵²

Pada tanggal 31 Juli 1999 pemerintah menggabung beberapa bank yakni Bank Bumi Daya, Bapindo, Bank Dagang Negara dan Bank Exim dalam satu bank ialah PT. Bank Mandiri (Persero). Hal tersebut menjadikan Bank Mandiri sebagai pemilik baru BSB.

Bank Mandiri kemudian mengkonsolidasi pembentukan tim dalam mengembangkan bank-bank syariah di Indonesia. Tim tersebut memiliki tugas dalam mengembangkan produk bank syariah ke dalam perusahaan Bank Mandiri untuk

⁵²Bank Mandiri Syariah, "Sejarah", *Situs Resmi Bank Mandiri Syariah*, <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah> (15 September 2020).

merespon hal-hal yang telah ditetapkan UU No.10 Tahun 1998 mengenai layanan transaksi dual banking

Tim yang mengembangkan bank syariah diindonesia mengatakan bahwa diberlakukannya UU merupakan suatu hal yang tepat dalam bagi PT Bank susila Bakhti dalam mengkonversi yang awalnya bank konven lalu kemudian beralih ke perbankan syari'ah. Sebab itulah, dalam mengembangkan perbankan syari'ah diindonesia, dibentuklah tim untuk menyiapkan system dan berbagai invrastruktur untuk mengubah bank konvensional menjadi bank syariah yang berubah nama menjadi PT PT Bank Syariah Mandiri dan telah ditulis dalam Akta Notaris: Sujipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. PT Bank Syariah Mandiri telah resmi melakukan kegiatan usahanya pada Tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tumbuh menjadi bank dengan idealism yang sesuai dengan nilai-nilai dalam islam, dalam menjalankan operasional usahanya. Keharmonisan dalam mengidealisasikan usahanya dengan nilai yang sesuai dengan syariat islam menjadikan bank ini unggul sebagai perbankan berbasis syariah diindonesia.⁵³

2. Profil Bank Syari'ah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar

a. Profil perusahaan

Nama : Bank Syari'ah Mandiri KC Panakkukang Makassar

⁵³Bank Mandiri Syariah, "Sejarah", *Situs Resmi Bank Mandiri Syariah*, <https://www.mandirisyahiah.co.id/tentang-kami/sejarah> (15 September 2020).

Alamat : JL. Boulevard kav. Edelweys A3 No.2, Panakkukang
Makassar, Sulawesi Selatan

Telepon : (0411) 455151

Link : www.mandirisyariah.co.id

Jumlah pegawai : 23

3. Visi dan Misi

a. Visi

- 1) Bank Syariah Terdepan : Menjadi bank syariah yang selalu Unggul di antara pelaku industri perbankan di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, Commercial, dan Corporate.
- 2) Bank Syariah Modern : Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen riil.

- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.⁵⁴

4. Product dan Jasa Bank Syariah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar

PT Bank Syariah Mandiri ialah bank yang menggunakan system syariah memiliki bermacam-macam product untuk memenuhi keinginan nasabah. Product-product Bank Syariah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar ialah:⁵⁵

a. Product penghimpun dana/uang

1) Tabungan

a) Tabungan/saving BSM

Tabungan/saving BSM digunakan nasabah ingin menarik dan menyetor uangnya dalam bentuk rupiah yang bisa dilakukan apabila jam kash di buka dan dapat menarik dan menyetornya ke kantor BSM ataupun melalui ATM dengan akad mudhorabah muthlaq.

b) Tabungan berencana BSM

⁵⁴Bank Mandiri Syariah, “Sejarah”, *Situs Resmi Bank Mandiri Syariah*, <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah> (15 September 2020).

⁵⁵Bank Mandiri Syariah, “Produk-produk dan jasa”, *Situs Resmi Bank Mandiri Syariah*, <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah> (15 September 2020)

Tabungan berencana BSM digunakan bagi nasabah apabila ingin menabung uangnya secara berjangka dengan memperoleh nisbah/keuntungan secara bertahap guna mencapai target yang diinginkan jenis product ini kurang lebih seperti tabungan tabungan BSM dengan akad mudhorabah muthlaq

c) Tabungan wadiah

Tabungan yang didasarkan pada prinsip wadi'ah yadh dhomanah, yang dapat ditarik kapan saja nasabah menghendaki sesuai kesepakatan

d) Tabungan dollar

Tabungan yang menggunakan akad wadi'ah yadh dhomanah, digunakan bagi nasabah yang ingin menarik dan menyetor dananya dalam bentuk dollar kapan saja nasabah menghendaki sesuai kesepakatan

e) Tabungan pensiun

Tabungan pensiun menggunakan akad mudhorabah muthlaq yang digunakan bagi nasabah yang ingin menyimpan dananya dalam bentuk rupiah dan dapat ditarik kapan saja nasabah menghendaki sesuai dengan kesepakatan.

f) Tabungan mabrur

Tabungan mabrur menggunakan mudhorabah muthlaq yang digunakan bagi nasabah yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji dan umroh menggunakan mata uang rupiah

g) Tabungan mabrur junior

Tabungan mabrur junior yang digunakan bagi nasabah yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji dan umroh menggunakan mata uang rupiah minimal usia dua belas tahun.

h) Saving stock syari'ah

Saving stock syari'ah berfungsi untuk memudahkan nasabah dalam menyelesaikan transaksinya mengenai Efek yang terdapat dalam rekening KSEI menggunakan akad mudhorabaha muthlaq.

2) Giro

a) BSM Giro

BSM Giro digunakan bagi nasabah yang ingin menyimpan dananya kedalam mata uang USDollar agar memudahkan melakukan pengelolaan transaksi menggunakan akad *wadi'ah yad dhomanah* baik individu maupun nonindividu

b) Giro Valas

Giro Valas digunakan bagi nasabah yang ingin menyimpan dananya kedalam mata uang USDollar agar memudahkan melakukan pengelolaan transaksi menggunakan akad *wadi'ah yad dhomanah* baik individu maupun nonindividu

c) BSM Giro Euro

BSM Giro Euro berfungsi untuk menyimpan dana/uang kedalam bentuk EURO menggunakan akad *wadi'ah yad dhomanah*.

3) Deposito

a) BSM Deposito

BSM Deposito digunakan bagi nasabah yang ingin berinvestasi dengan menggunakan dollar sebagai mata uangnya dalam periode tertentu menggunakan akad mudhorabah muthlaq bagi individu maupun non individu

b) BSM Deposito Valas

BSM Deposito Valas digunakan bagi nasabah yang ingin berinvestasi dengan menggunakan dollar sebagai mata uangnya dalam periode tertentu menggunakan akad mudhorabah muthlaq bagi individu maupun non individu

b. Product saluran dana/uang

1) Financing Implan

Financing implan, digunakan oleh pegawai tetap yang ingin melakukan pembiayaan konsumen dengan valuta asing dan diajukan secara berkelompok

2) Financing untuk pensionan

Financing untuk pensionan ialah saluran untuk memfasilitasi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan untuk dana tunjangan termasuk pembiayaan multiguna yang mana bank memotong sebagian dari iuran setiap bulannya dengan menggunakan akad ijarah atau murobahah.

3) Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Product ini digunakan untuk membiayai kendaraan bermotor bagi nasabah yang ingin membeli motor menggunakan system murobahah

4) Pembiayaan Griya

Pembiayaan Griya berfungsi untuk membiayai kebutuhan masyarakat seperti tempat tinggal baik bekas ataupun baru, menggunakan system murobahah.

5) Pembiayaan Mikro Umroh

Pembiayaan mikro umroh BSM berfungsi untuk membiayai nasabah yang ingin melakukan perjalanan umroh.

6) Working capital financing

Working capital financing berfungsi dalam membiayai kebutuhan jangka pendek yang digunakan bagi nasabah yang membutuhkan modal kerja

7) Pembiayaan Investasi

Product ini digunakan untuk pembiayaan jangka pendek/panjang dengan menggunakan rupiah dan valuta asing agar memenuhi kebutuhan investasi yang layak menurut bank seperti modernisasi, rehabilitasi, perluasan, mendirikan proyek baru dan lain sebagainya.

8) BSM Cicil Emas

BSM Cicil Emas ialah product yang dapat digunakan nasabah dalam melakukan pembiayaan untuk membeli emas batang dan digunakan untuk memperoleh return.

9) BSM Gadai Emas

BSM Gadai Emas ialah product pembiayaan dengan syarat/jaminan emas dalam mendapatkan uang cash dengancepat.

c. Services/jasa

1) Services product

a) Mandiri Syari'ah Debet

GPN ialah product card dengan teknologi chip yang dibuat oleh bank syariahmandiri yang dihubungkan melalui jaringan domestic yang berfungsi untuk transaksi ATM dan debet card di gunakan pada semua mecine ATM/EDC domestic.

b) BSM Sentra Bayar

BSM Sentra Bayar ialah product yang digunakan bank untuk nasabah yang ingin membayar tagihannya baik individu ataupun perusahaan baik dengan tunai, smsbanking, autadebet, dan ATM Bank Syari'ah Mandiri.

c) BSM SMS Banking

BSM SMS Banking ialah product untuk melayani nasabah melakukan transaksi dengan layanan internet menggunakan HP seluler.

d) Mandiri Syari'ah Mobile

Mandiri Syari'ah Mobile digunakan untuk menyalurkan layanan electronic bank agar memudahkan bank dalam mengkses rekening nasabah menggunakan telepon ataupun computer.

e) BSM Net Banking

Dapat melayani nasabah dengan link(<https://bsmnet.syariahamandiri.co.id>).

f) Transfer Uang Tunai

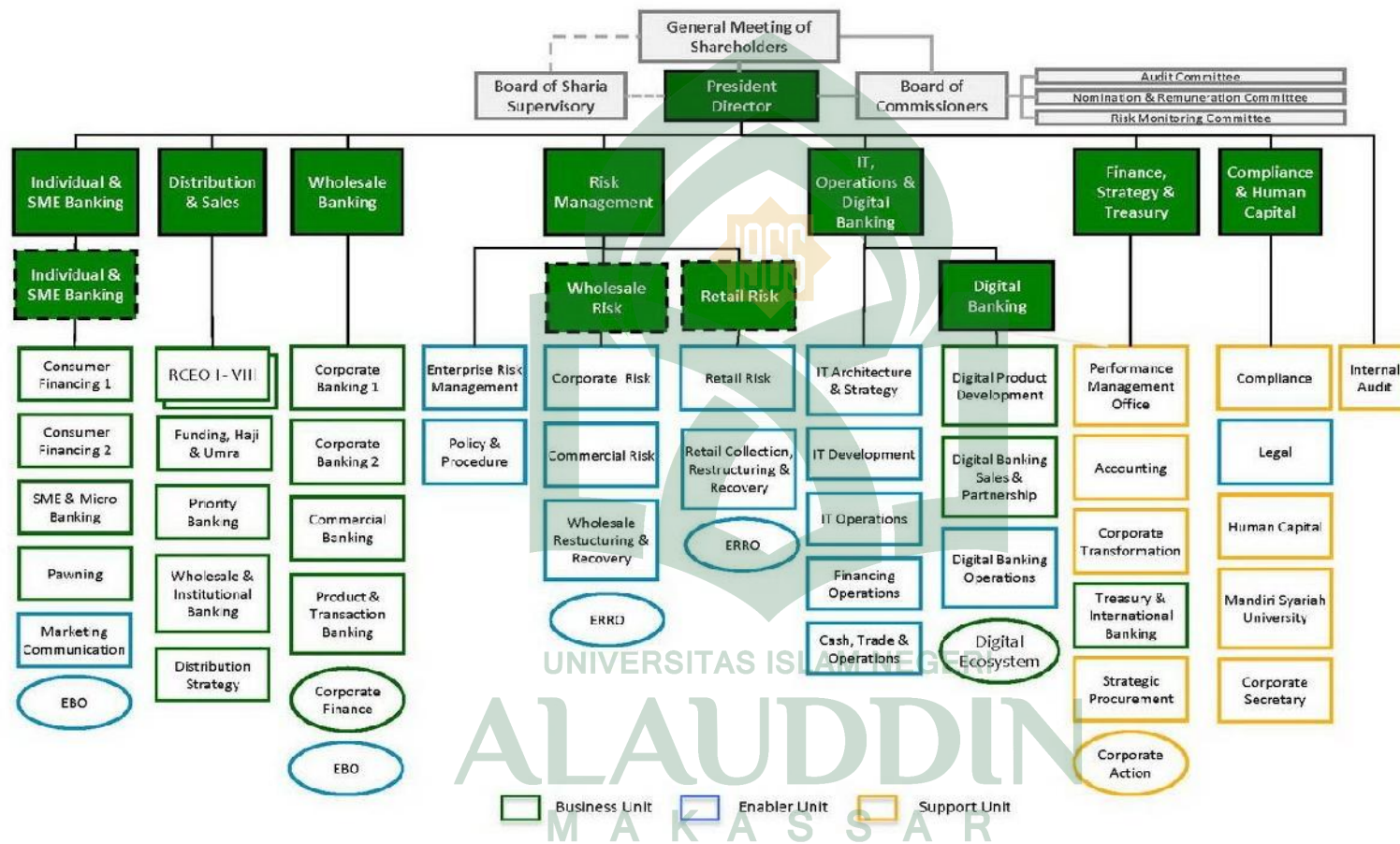
BSM Transfer uang tunai berfungsi apabila nasabah ingin mengirimkan uangnya untuk keluarga ataupun rekan bisnisnya walaupun berada ditempat yang sulit dijangkau oleh layanan perbankan. Product tersebut ialah BSM Net Banking ataupun BSM Mobile Banking GPRS.

g) BSM e-Money

BSM e-Money ialah jenis cart berbasis smartcars yang disebarluaskan oleh BSM bersama Bank Mandiri.



5. Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar⁵⁶



⁵⁶ Bank Mandiri Syariah, “Sejarah”, *Situs Resmi Bank Mandiri Syariah*, <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah> (15 September 2020).

B. Konsep Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Murabahah Di Perbankan Syariah

Dari berbagai macam jenis jual beli yang ditawarkan dalam bank syariah dalam membiayai investasi dan moda kerja menggunakan akad bay al-murobahah.⁵⁷ Jika didasarkan pada fathwa DSN MUI No. 4/ DSN-MUI/ IV /2000 mengenai murobahah. Akad murobahah ialah suatu transaksi dengan menjual beberapa product yang mana harga aslinya diberitahukan kepada konsumen beserta keuntungan/laba yang diperolehnya dan product tersebut harus berada ditangan bank sebelum menyerahkannya kenasabah.⁵⁸

Sebelum lebih jauh membahas tentang Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, sebaiknya diketahui mengenai kedudukan dari fatwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, MM selaku anggota DSN Sul-Sel bahwa kedudukan dari fatwa yang merupakan hasil dari ijma para ulama mengenai suatu permasalahan yang harus diberikan hukum baru, disetiap lembaga keuangan syariah pada dasarnya berprinsip jual beli dengan menggunakan model murabahah. Sedangkan dalam konsep murabahah sendiri telah memiliki aturan umum, aturan khusus dan bagaimana mekanisme keputusan yang akan di ambil

⁵⁷Yeni Kurniawati “Implementasi Fatwa Dsn-Mui Dalam Pembiayaan Dengan Akad Murābahah Di Pt. Bprs Magetan” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2018), h. 31

⁵⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah (diakses 26 September 2020)

“Jadi fatwa itu kan ijma ulama mengenai hukum, lembaga keuangan syariah kan pada dasarnya menggunakan prinsip jual beli dengan menggunakan model murabahah, sedangkan dalam konsep murabaha sendiri telah memiliki aturan tersendiri baik itu aturan umum, khusus dan mekanisme keputusannya⁵⁹

Dalam fathwa DSN- MUI No. 04/ DSN-MUI/ IV /2000 terdapat ketentuan umum mengenai murobahah dalam perbankan syari’ah:⁶⁰

1. Aqad murobahah yang terjadi antara bank serta nasabah haruslah terbebas dari bunga/riba.
2. Barang/produk tersebut dibolehkan dalam syariat islam
3. Harga awal untuk membeli barang tersebut menjadi tanggung jawab bank baik dibayar secara bertahap ataupun seluruhnya.
4. Pembelian barang oleh bank harus atas nama bank dan sah secara hokum dan terbebas dari riba
5. Jika barang yang dibeli secara kredit maka bank harus transparan kepada nasabah berkaitan dengan pembelian
6. Bank lalu menawarkan barang yang dipesan tersebut kepada nasabah seharga barang ditambah keuntungan. Bank diharuskan menerangkan harga asli barang tersebut ditambah biaya-biaya lainnya.
7. Konsumen mampu membayar product tersebut sesuai ketetapan waktu yang ditentukan.

⁵⁹Dr.Ir. H. Idris Parakkasi, MM (54), *Anggota DSN MUI, Wawancara*, Makassar, 4 November 2020

⁶⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah (diakses 26 September 2020)

8. Dalam menghindari batalnya akad, pihak bank harus melakukan perjanjian dengan nasabah.
9. Apabila bank menyuruh nasabah untuk diwakli, maka jual beli dilakukan setelah barang dan telah menjadi bank.

Poin kedua mengenai Ketentuan murābahah kepada Nasabah:

1. Nasabah membuat permohonan untuk membeli barang melalui bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank lalu memberikan tawaran kepada nasabah dan nasabah harus membeli barang tersebut sesuai kesepakatan sehingga akan mengikat bank dan nasabah dalam suatu kontrak.
4. Bank bisa melakukan permintaan berupa uang muka nasabah ditujukan agar nasabah serius melakukan akad.
5. Apabila nasabah tidak jadi membelinya, maka ganti ruginya melalui uang muka dari nasabah.
6. Apabila kerugian tersebut lebih tinggi dari uang muka, maka bank dapat meminta tambahan kepada nasabah.
7. Apabila uang yang digunakan untuk membeli suatu product adalah contact urbun, maka:
 - a. Apabila konsumen/nasabah setuju membeli product tersebut, maka sisanya dapat dilanjutkan oleh nasabah

- b. Apabila konsumen/nasabah tidak jadi membeli product tersebut maka uang jaminan yang diberikan untuk membeli product tersebut bukan lagi menjadi milik nasabah tetapi apabila jaminan tersebut kurang, maka nasabah harus membayar kekurangannya.

Berdasarkan ketentuan dan aturan yang telah terjelaskan dalam fathwa DSN- MUI Nomor 4 Tahun 2002, maka selanjutnya untuk hal implementasi dan aplikasi fatwa atau aturan dan ketentuan ini, seharusnya sudah sejalan dalam praktiknya pada perbankan syariah terkait produk-produknya yang diberikan kepada nasabah. Tapi pada praktiknya dilapangan sering terjadi, pegawai bank biasanya tidak memahami isi atau muatan dari fatwa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, MM selaku anggota dari DSN Sul-Sel, bahwa:

“...dan kalau lembaga keuangan di bank syariah ada penyimpangan yah bukan fatwanya yang bermasalah, yang bermasalah yaitu orang atau lembaga keuangan yang menerapkannya yang keliru, para pegawai biasa keliru karena tidak tau dan tidak mau belajar dan kedua dorongan untuk betul- betul menerapkan sesuai dengan syariat dan rukun itu masih lemah yang ketiga karena kesulitan semisal tidak mau repot, proses yang terlalu bertele- tele karena setiap rukun dan syarat yang harus terpenuhi dianggap akan menyita waktu. Selain itu dari pihak DPSnya sendiri masih kurang maksimal dalam memberikan pengawasan kepada pihak banknya. Sebenarnya jika pihak bank betul- betul mau memaksimalkan penerapan fatwa tersebut maka tidak ada masalah didalamnya cuman dalam pengaplikasiannya masih kurang kesadaran dari pihak bank tersebut...”⁶¹

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh pihak DSN bahwa dalam proses pengaplikasian dari Fatwa MUI ini sebenarnya tidak ada kendala didalamnya asalkan dalam proses pengaplikasiannya betul- betul memperhatikan syarat serta

⁶¹Dr.Ir. H. Idris Parakkasi, MM (54), *Anggota DSN MUI, Wawancara*, Makassar, 4 November 2020

rukun yang berlaku, sehingga setiap orang diperbankan memiliki peranan yang sangat penting, karyawan bank yang secara langsung berhadapan dengan nasabah harus betul-betul memahami setiap prosedur dari pembiayaan pensiun yang tentunya didasarkan pada fatwa MUI, serta peran dari para atasan bank yang sebaiknya bersikap tegas terhadap para karyawannya yang apabila terdapat hal yang bertentangan dengan penerapan fatwa MUI. Pada intinya, fatwa DSN MUI tidak bertentangan dengan syariah, namun yang terkadang keliru adalah penerapan atau pengaplikasiannya yang kurang tepat.

Kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan dilihat relevansi fatwa dan ketentuan yang sudah dipaparkan sebelumnya terhadap praktik produk pembiayaan dana pensiun yang diberikan PT. Bank Mandiri Syariah, Cabang Panakkukang, Makassar.

C. Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Dana Pensiun

Bank Syariah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar memiliki produk pembiayaan yang target nasabahnya yaitu para pensiunan. Pegawai yang menerima dana tunjangan ialah pegawai PNS, ASND, ASNP, TNI POLRI, pegawai BUMN atau BUMD serta telah mempunyai SK pensiun.⁶²

Skema pembiayaan pensiunan pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dimulai dengan skema jual-beli (murabahah), sewa (ijarah), atau pengalihan utang/ Qardh Wal Murobahah/ Musyarakah mutanaqisah/ Qardh Wal Ijarah/Ijarah

⁶² Pembiayaan dana pensiun “Situs Resmi Bank Mandiri Syariah, <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah> (15 September 2020).

MuntahiyaBit Tamlik. Pembiayaan tersebut di berikan pada penerima tunjangan BSM. Limit pembiayaan maksimal yang diberikan kepada nasabah yaitu RP. 350.000.000,00 atau di sesuaikan oleh batas maximal DSR nasabah serta lama permohonan dengan rentang waktu pembayaran paling lama lima belas tahun. Sedangkan untuk usia minimal pengajuan pembiayaan pada pensiunan yaitu lima puluh tahun tahun kecuali pensiunan janda yaitu dengan batas minimal empat puluh delapan tahun. Sedangkan umur maximal nasabah ketika masa pembayaran adalah tujuh puluh lima tahun, hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu karyawan BSM yang bertugas sebagai *Marketing Consumer* atas nama Hartina.⁶³

“Pembiayaan diberikan kepada pensiun PNS yang sudah pensiun ataupun pensiun janda yang suaminya pensiun lalu meninggal dunia dan gajinya masuk ke ahli waris yaitu istrinya, itu yang bisa diberikan pembiayaan dan pembiayaan pensiun itu bisa diberikan kepada pensiunan taspen dan pensiunan yang sudah bekerjasama dengan BSM dalam arti dapennya seperti dapen mandiri, telkom sama lindo selain itu mengenai maksimal pembiayaannya itu bisa sampai Rp.350.000.000 dengan jangka waktu maksimal sarannya itu 15 tahun dengan usia pada saat jatuh tempo 74 tahun, sejak tahun 2016 kalau tidak salah”

Pada pembiayaan yang ditawarkan BSM mensyaratkan adanya jaminan yang harus diberikan yaitu penyertaan SK pensiunan asli, sedangkan jika pensiunan janda perlu menyertakan SK Pensiunan Terusan / Otomatis /Janda Asli. Jumlah Debt Service Ratio DSR pensionan dan pensionan wanita yang sudah menjanda maximal tujuh puluh persen dari penggunaan pensionan perbulan. Dalam hal pembiayaanpensiunan di Bank Syariah Mandiri (BSM), bank akan mengelola dan menyalurkan pengelolaan dana pension seperti TASPEN melalui PMP (penerima

⁶³Hartina (28 Tahun), *Marketing Consumer*, Wawancara, Makassar, 24 Juli 2020.

manfaat pension), sebagaimana BSM sudah melakukan bekerjasama dengan mitra yang mengelola dana tunjangan, dalam hal ini TASPEN. jumlah dana pensiun yang dikelola oleh BSM sebesar RP. 18.000.000.000 hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan karyawan BSM dibagian RBR atas nama Arif Wirabuana.⁶⁴ Memperoleh product dana pension dari BSM, sehingga ketentuannya adalah yang menerima dana tunjangan telah membayar iurannya kepada yang mengelola dana tunjangan (TASPEN). Ketika penerima tunjangan meng-ajukan pembiayaannya melalui bank, maka penyaluran dana akan dilakukan oleh BSM dari TASPEN kepada pensiunan.

“Kalau nasabahnya cukup banyak yah, Cuma untuk...tunggu saya cek dulu di data ku..ada data terbaru itu.hhhmmm.kalau anunya, kalau nasabahnya saya tidak tau yahh Cuma untuk see apaa ini, untuk cabang ini saja?kalau pembiayaannya sudah ada sudah sampai 18 Milyar, tapi tetap tumbuh, kalau untuk jumlah berapa yang pensiun banyak sih, biasa ada yang gaji lewat sini tapi tidak mengambil pembiayaan ada juga yang mengambil”

Dalam program pembiayaan pensiunan tentunya tidak dapat dihindarkan dengan yang namanya resiko baik itu risiko tertanggung nasabah, oleh pihak bank salahsatunya dengan melihat umur nasabah yang akan diberikan pembiayaan yang tentunya sudah tidak termasuk dalam usia produktif dan rentan dengan masalah kesehatan, adapun resiko yang ditanggung oleh pihak bank yaitu menjalankan pembiayaan pensiun dan resiko selanjutnya yakni banyak mafia-mafia yang menggunakan data pensiunan untuk disalahgunakan selain itu menurut informan solusinya yakni melakukan pengecekan ke data taspen dan data kependudukannya dicek apakah sesuai dengan orang yang bersangkutan dan instansi dimana mereka

⁶⁴ Arif Wirabuana, (45 Tahun), Retail Banking Representatif (RBR), *Wawancara*, Makassar, 24 Juli 2020.

pensiun. Adapun untuk mitigasi resikonya pada saat wawancara dengan nasabah dilakukan survey ke rumah nasabah kemudian juga melakukan survey ke rumah tetangga nasabah yang terdekat untuk menanyakan memastikan kebenaran data diri nasabah. Proses pengajuan pembiayaan pensiun di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Panakkukang Makassar dilakukan dengan cara Nasabah mengajukan formulir yang telah disediakan dengan melampirkan data diri yaitu KTP suami/istri, NPWP, Kartu keluarga, Dokumen legal seperti SK dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Sama halnya mengenai hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hartina yang bertugas sebagai *Marketing Consumer* di BSM.⁶⁵

Akad yang digunakan dipembiayaan pension di PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar yakni akad murobahah atau akad jual beli yang multiguna artinya bebas dipakai untuk keperluan apa saja selama itu masil halal, namun jika nasabah tidak mempunyai fasilitas ditempat lain, tetapi jika nasabah mempunyai fasilitas ditempat lain itu memakai akad qord dan wajib dilunasi sebelumnya. Berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 4 Tahun 2002 mengenai implementasinya pada *PT. Bank Mandiri Syariah, Cab. Panakkukang, Makassar*, narasumber memberikan keterangan, bahwa:

1. Penyelesaian utang pembiayaan dana pensiun pada Bank Syariah Mandiri Cabang Panakukang Makassar

Pada dasarnya, dalam menyelesaikan hutang pada akad murobahah pihak yang memesan tidak ada hubungannya dengan pihak lain diluar transaksi ini,

⁶⁵Hartina (28 Tahun), *Marketing Consumer*, Wawancara, Makassar, 24 Juli 2020.

sehingga apabila konsumen/pemesan menjual productnya kembali kepada pihak ketiga maka hal tersebut sah-sah saja namun tetap memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya kepada pihak pertama.

Apabila yang memesan ingin menjual productnya namun belum lunas kreditnya, maka dia tidak harus melunasi seluruh hutangnya. Contohnya apabila dalam menjual product tersebut terdapat kerugian, dan nasabah/konsumen juga merupakan pedagang, maka sipemesan tetap berkewajiban untuk selesaikan angsurannya yang telah disepakati bersama. Hal tersebut terjadi karena kontrak antara nasabah/konsumen dengan pihak ke-3 tidak ada hubungannya dengan pihak pertama.

Jika pemesan yang berutang dianggap pelit dan gagal menyelesaikan utangnya karena tidak mampu secara ekonomi dan bukan lalai, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup kembali. Allah SWT telah berfirman dalam (Q.S Al-Baqarah/2: 280) :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. dan jika kamu meyekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dalam praktik di perbankan dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Cabang Panakukang Makassar, situasi dimana nasabah telat atau tidak bisa melunasi utangnya pada bank adalah suatu hal yang jarang terjadi. Namun apabila situasi dimana pihak konsumen/nasabah tidak bisa melunasi utangnya pada bank maka

perbankan yaitu Bank Syari'ah Mandiri Cabang Panakukang Makassar melakukan penarikan/pemutusan pada pembiayaan nasabah tersebut.

Dari hal tersebut bisa dilihat bahwa ada *gap* antara teori murabahah tentang utang dengan apa yang kemudian di praktikkan melalui pembiayaan dana pensiun dalam Bank Syari'ah Mandiri Cabang Panakukang.

2. Implementasi fatwa pertama dalam pembiayaan dana pensiun Bank syariah Mandiri cabang Panakukang Makassar

Pada pembiayaan dana Pensiun BSM Cabang Panakukang Makassar, antara nasabah dengan bank menggunakan akad murabahah dimana dalam penentuannya ada harga penjualan dan lama waktu membayar kredit. Tidak terdapat riba dalam akad murobahah hal ini dikarenakan lama waktu membayar kredit tidak dipengaruhi oleh keseluruhan harga barang. Misalnya, dalam mensimulasi pembiayaan yang sebelumnya sudah dijelaskan pada bab sebelum-nya ialah:

- Harga penjualan Jual Mobil Rp.135.200.000-
- Apabila sepakat akan mencicil sampai satu tahun, sehingga angsurannya $\text{Rp.135.200.000-} : 12 = \text{Rp.11.266.666-}$
- Sehingga keseluruhan yang akan dibayar $\text{Rp.11,266.666-} \times 12 = \text{Rp 135.200.000-}$
- Apabila sepakat akan mencicil sampai dua tahun, sehingga angsurannya $\text{Rp.135.200.000-} : 24 = \text{Rp.5.633.333-}$
- Sehingga keseluruhan yang akan dibayar $\text{Rp. 5.633.333-} \times 24 = \text{Rp.135.200.000-}$

Apabila merujuk pada kasus tersebut, maka lama waktu membayar angsuran tidak akan dipengaruhi oleh keseluruhan harga barang yang sudah disepakati. Sehingga dari sini dapat diketahui tidak terdapat riba dalam pelaksanaan akad murobahah yang mana “akad murobahah yang dilakukan antara nasabah dan bank haruslah terbebas dari riba”. Tidak berlakunya time value of money dalam perbankan syaria’ah akan menguntungkan nasabah/konsumen sehingga nasabah/konsumen lebih suka pilih rentang waktu yang lama, namun di pihak bank rentang waktu yang tidak lama lebih menguntungkan. Sebab itulah karena terjadinya ketidak sesuaian keinginan antara bank nasabah/konsumen sehingga akan diselesaikan dengan negosiasi untuk mendapatkan jalan tengah untuk rentang waktu membayar angsuran

Product yang ditransaksikan dalam pembiayaan dan tunjangan berupa kendaraan motor serta survei yang dilakukan bank untuk mengecek kondisi product, hal tersebut sama halnya pada ketentuan fatwa pertama sampai ke dua yaitu “product yang dibolehkan ialah sesuai syariat islam” terdapat standar kelayakan suatu barang BSM cabang Panakukang Makassar, dapat diketahui melalui tahun penjualan kendaraan tersebut. Apakah masih baru atau bekas. Apabila barangnya tergolong baru maka jumlah pembiayaannya ialah 80% sisanya yang 20% menjadi tanggungan calon nasabah/konsumen. Namun jika barang tersebut second, pembiayaannya hanya mencapai 70% sisanya menjadi tanggungan nasabah/konsumen. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada fatwa 1 point ke 3 yang mengatakan bahwa “Bank mengeluarkan separuh ataupun semua harga dari pembeli barang yang sudah dipastikan kualitasnya.” Untuk mengadakan product

yang di perlukan nasabah/konsumen, bank membeli product tersebut atas nama pihak bank, yang diwakili oleh nasabah/konsumen, tujuannya supaya nasabah/konsumen puas. Hal ini sesuai pada ketentuan fathwa poin ke-4 yaitu “bank akan membelikan nasabah product yang sesuai keinginannya atas nama bank dan tidak terdapat riba dalam pelaksanaannya.” Dalam membeli suatu product bank mendelegasikan kenasabah, hal ini berarti nasabah/konsumen harus menyampaikan segala hal yang memiliki kaitan pada pembelian, hal tersebut terdapat ketidaksesuaian antara fathwa poin ke-5 yang isinya “pihak perbankan harus menjelaskan segala hal yang ada kaitannya dengan proses transaksi, seperti apabila dilaksanakan dengan hutang”. Product tersebut harus ditentukan berapa harga penjualannya yang di hitung melalui keseluruhan harga dari pembelian ditambah keuntungan yang telah ditentukan bersama, dan perhitungannya sudah terdapat didalam akad. Hal ini terdapat kesesuaian dengan fathwa poin ke-6 yaitu “Bank selanjutnya menawarkan product tersebut kenasabah dengan memberitahukan harga jualnya ditambah keuntungan dan bank dalam menyampaikan hal tersebut haruslah jujur segala hal yang berkaitan dengan penjualan.” Apabila nasabah/konsumen dan bank sudah mensepakati ketentuan tersebut, maka nasabah/konsumen berkewajiban untuk membayarnya secara berangsur sesuai kesepakatan. Hal ini terdapat kesesuaian dengan fathwa poin ke tujuh yaitu “Nasabah/konsumen kemudian berkewajiban untuk melunasi product tersebut secara berangsur atau sekaligus sesuai ketentuan” dalam pembiayaan dana tunjangan, apabila terdapat ketidaktepatan perjanjian maka pihak perbankan bisa memberhentikan akad sesuai kesepakatan. Hal tersebut sudah ditetapkan dalam fathwa poin kedelapan yang mengatakan” agar tidak

terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan rusaknya akad maka pihak perbankan bisa membuat kesepakatan bersama secara khusus dengan nasabah/konsumen”

Ketika pihak BSM membuat perjanjian murobahah bersama nasabah/konsumen, dan pada saat itu juga bank memberikan pendelegasian kepada nasabah/konsumen dalam pembelian kendaraan yang sesuai dengan keinginannya, kemudian BSM mengkuasakan kepada nasabah untuk memilih sendiri kendaraan yang diinginkannya melalui upplier. Sehingga dapat dikatakan akad murobahah terjadi sebelum barang menjadi milik bank, padahal yang harusnya akad murobahah terjadi setelah barang telah ditangan bank. Ketentuan tersebut tentu tidak sejalan terhadap ketentuan yang sudah diputuskan oleh fatwa di poin kesembilan dengan ketentuan bahwa “apabila bank ingin memberikan pendelegasian kenasabah dalam pembelian suatu product melalui pihak ke3, akad jual beli/murobahah seharusnya terjadi setelah barang/product telah menjadi milik bank.” Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh bapak Idris selaku anggota dari DSN Sul-Sel, bahwa:

“...kan murabahah itu harus ada barang yang dibeli atau mislanya diwakalahkan nanti akad murabahanya dilakukan pada saat barang sudah ada. Jadi wakalahkan dulu silahkan dibeli barangnya nanti akad murabahanya dibuat setelah hukum barang itu ada...”⁶⁶

Sehingga dalam ketentuan yang telah ditetapkan apabila bank mengkuasakan kenasabah dalam pembelian suatu product, maka akad murobahah harus terjadi setelah product secara sah berada ditangan bank. Pada saat memberikan pendelegasian akad yang digunakan ialah wakalah, tetapi masalahnya pihak BSM lebih dulu melakukan akad murobahah barulah kemudian

⁶⁶Dr.Ir. H. Idris Parakkasi, MM (54), *Anggota DSN MUI, Wawancara, Makassar, 4 November 2020*

menggunakan wakalah. Padahal yang harusnya terjadi ialah menggunakan akad wakalah lebih dulu kemudian akan murobahah apabila product sudah ditangan bank. Alasan BSM melakukan pendelegasian kepada nasabah/konsumen dalam pembelian suatu product ialah agar nasabah/konsumen puas serta yakin dengan pilihannya sendiri. Namun apa yang dilakukan BSM tetap terdapat kekurangan dan kelebihanannya, karena apabila terdapat kesalahan maka yang akan berurusan ialah nasabah/konsumen dengan produsen. Sehingga dapat menyebabkan nasabah/konsumen merasa tidak puas dalam melakukan pembiayaan bersama pihak bank, padahal semestinya apabila terjadi kesalahan maka akan di tanggung bersama, apabila di lihat melalui fathwa MUI dan praktik yang dilakukan oleh pihak BSM cabang panakkang telah sesuai dan dalam proses pembiayaan dana pensiun tidak ada yang keluar dari ketentuan MUI hal tersebut didapatkan dari wawancara yang telah dilakukan bersama Arif Wirabuana yang merupakan RBR dari BSM cabang Panakukang Makassar.

3. Implementasi Fatwa MUI Kedua Pada Pembiayaan Dana Pensiun Bak Syariah Mandiri Cabang Panakukang Makassar

Mekanisme proses pembiayaan pensiunan dimulai dari dijalinnnya kerja sama melaluipihak bank dan pihak yang akan mengelola dana tunjangan ialah TASPEN. Nasabah yang memiliki dana pensiun di TASPEN apabila ingin mengajukan pembiayaan pensiun di BSM perlu mengisi dan mengajukan form pengajuan pembiayaan pensiun. Selanjutnya BSM melakukan pengecekan kelengkapan dokumen pengajuan. Tahapan setelahnya adalah BSM melakukan investigasi atas kebenaran data dengan melakukan BI checking.

Apabila pengecekan BI berhasil, maka bank akan mengapproval yang disesuaikan dengan limit kebenarannya. Penginputan dilakukan dengan menginput approval kedalam FOS setelah menginvestigasi kebenarannya. Step selanjutnya dilakukan sama apabila nasabah mengajukan limit diatas kewenangan yang memutuskan. Apabila sudah terdapat approval, nasabah/konsumen di SP3 (surat persetujuan pembiayaan) oleh perbankan untuk diisi. Kemudian nasabah/konsumen melakukan penyerahan kembali SP3 yang telah diisi ke pihak BSM.

BSM selanjutnya membuatkan rekening bagi nasabah/konsumen untuk melakukan penyelesaian dalam membuat rekening untuk pembiayaan pensiunan. Apabila nasabah sudah mempunyai rekening pembiayaan pension, maka nasabah/konsumen juga bisa mencairkan dana untuk pembiayaan pensiun. Proses dalam mencairkan dana di BSM dikerjakan oleh unit yang berfungsi sebagai disbursement sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Ketika pembayaran untuk tunjangan diberikan atau pembiayaan tersebut maka pencairan melalui rekening nasabah/konsumen dengan mendebet pembayaran pengangsuran pada saat itu juga sehingga apabila lambat dalam melakukan pembayaran, dendanya dapat diminimalisir. Berikut adalah kriteria dan syarat dokumen yang diperlukan ketika hendak mengajukan pembiayaan dana pensiun di BSM.⁶⁷

Hal-hal yang harus dipenuhi calon nasabah/konsumen:

- Cakap Hukum

⁶⁷ Pembiayaan dana pensiun “diakses <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-pensiun-berkah> (15 September 2020).

- Pensionan ASN (Aparatur Sipil Negara Pusat)/ Daerah, Pensionan karyawan BUMN yang mendapatkan tunjangan pensionan tiap bulan
- Ketika sampai pada waktu pembiayaan, nasabah/konsumen berusia max 75 tahun.
- Setuju melakukan pemindahan dalam membayar pensiunan tiap bulannya kepada BSM
- Pemanfaatan tunjangan diatur oleh perusahaan/badan yang bekerjasama dengan pihak BSM

Keperluan document:

- Permohonan pembiayaan nasabah/konsumen
- Fotokopy KTP nasabah/konsumen dan suami/istri
- Fotokopy KK (kartu keluarga)
- Fotokopy surat pernikahan/perceraian
- Surat asli dari penetapan pensiunan nasabah/konsumen
- Fotokopy IMB/SHM/STNK/SHGB/BPKB/PBB dalam melaksanakan pembiayaan menggunakan akad MMQ yang asli dan masih di simpan oleh nasabah/konsumen
- Menyediakan surat kuasa dan pernyataan dalam pemotongan pensiunan tiap bulan yang di terima dan telah disetujui nasabah/konsumen diatas materai

Hal tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu nasabah pengguna pembiayaan dana pensiun BSM Sementara itu, wawancara yang dilakukan dengan nasabah mengenai implementasi fathwa DSN-MUI mengenai akad murobahah terhadap product pembiayaan/financing dana pension di PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar, beliau mengatakan dalam wawancara yang dilakukan :

“Menurut saya pembiayaan pensiun ini bagus karena dapat meningkatkan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Kalau saya tidak salah ingat itu formulir asli permohonan pembiayaan beserta tanda tangan, sk pensiun asli, foto kopy kk, foto kopy akte nikah, foto kopy ktp, foto kopy NPWP dan pas foto 3*4. Iya jadi pada saat saya ingin mengajukan pembiayaan pensiun ini pihak bank menjelaskan tentang prosedur-prosedur yang harus saya siapkan dan juga akad-akad yang di pakai pada pembiayaan ini tapi saya sudah lupa nama akadnya.”⁶⁸

⁶⁸Supriadi (35), *Nasabah Pembiayaan Pensiun*, Makassar, Wawancara, 2 september 2020

Sejalan dengan yang dijelaskan oleh nasabah yang diwawancarai sebelumnya nasabah Pak Fahrul menjelaskan bahwa alasan dalam memilih pembiayaan/financing tunjangan di Bank Syari'ah Mandiri karena pelayanan yang diberikan oleh para karyawannya sangat memprioritaskan kenyamanan dari setiap nasabahnya.

“ Saya memilih di bank syariah karena pelayanan dari karyawan yang sangat memperhatikan kebutuhan nasabah selalu berusaha memberikan yang terbaik dan menjelaskan secara mendetail mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh nasabah itu kenapa saya memilih bank syariah mandiri di samping saya mencoba untuk mulai hijrah ke produk syariah”⁶⁹

Permasalahan dalam melaksanakan dan mengimplementasikan fatwa DSN- MUI No.4/ DSN-MUI/ IV /2000 mengenai murobahah melalui wawancara yang dilakukan bersama Arif Wirabuana yang bertugas sebagai RBR di BSM memberikan penjelasan tentang permasalahan yang terjadi dalam fathwa murobahah yaitu:

“yang saya tau mbak, tidak semua orang yang menggunakan product syariah tahu mengenai fatwa DSN- MUI. Bahkan sayapun belum paham apa mengenai fatwa murobahah. Lagi-lagi nasabah dalam melakukan pembiayaanpun belum paham betul tentang akad yang sudah disepakati bersama, nasabah lebih focus pada berapa persen bunga yang akan dibayarnya dan itulah yang pertama kali keluar dari mulut nasabah. Jadi apabila ada nasabah yang mau melakukan atau mengajukan pembiayaan yang pertama kali nasabah tanyakan ialah bunga nya tapi disyariah biasanya disebut margin/keuntungan. Yang saya jelaskanpun tidak panjang lebar mbak hanya sebatas angsurannya saja tiap bulan yang harus dibayar oleh nasabah. Nasabahpun belum tentu tahu mengenai apa murobahah itu. Yang jelas saya hanya menjelaskan seadanya saja kepada nasabah. Dan

⁶⁹Fahrul (40), *Nasabah Pembiayaan Pensiun, Makassar, Wawancara, 4 November 2020*

nasabahpun setuju-setuju saja yang jelas angsuran nya itu tidak memberatkan nasabah.⁷⁰

Yang menghambat DSN- MUI dalam melaksanakan fatwa mengenai murobahah disebabkan oleh orang-orang yang terlibat didalamnya yang kurang paham mengenai fatwa itu sendiri. Ditambah masyarakat yang hanya tahu berapa persn bunga dan jangka waktu pembayarannya, dan bank sendiri lebih memberikan penjelasan yang singkat tentang akad murobahah kepada nasabah yang mau melakukan pembiayaan.

Bapak Supriadi sependapat bahwa dalam melaksanakan pembiayaan tidak ada penjelasan secara rinci tentang akad murobahah

"saya tidak tahu ibu saya yang paling penting yang diketahui itu mengenai bunga nya berapa angsuran yang harus saya bayarkan perbulannya, saya tidak paham mengenai akad yang digunakan dan pihak banknya juga tidak menjelaskan, Kan yang penting itu bunganya tidak besar dan pembiayaan saya diterima oleh bank. Masalah akadnya apa ya saya ikut saja ibu."⁷¹

Hal tersebut juga diakui oleh Bapak Fahrul bahwa pihak bank tidak menjelaskan secara rinci tentang akad yang dipakai, sebagaimana pernyataan beliau:

"Saya memilih bank syariah karena saya tahu bahwa produk-produknya bebas dari riba, namun ketika saya melakukan pembiayaan ini pihak bank tidak menjelaskan secara rinci tentang penggunaan akad yang digunakan dalam setiap produk-produknya, intinya ketika syarat pengajuan

⁷⁰ Arif Wirabuana, (45 Tahun), Retail Banking Representatif (RBR), *Wawancara*, Makassar, 24 Juli 2020.

⁷¹Supriadi (35), *Nasabah Pembiayaan Pensiun*, Makassar, *Wawancara*, 2 september 2020

pembiayaan saya telah terpenuhi, saya melakukan akad dengan pihak bank tanpa tau jenis akad yang digunakan.⁷²

Jadi hambatan-hambatan dalam menerapkan fathwa juga terjadi pada karyawan di BSM sendiri. Karyawan BSM kurang paham secara rinci mengenai fathwa DSN- MUI. Tetapi karyawan BSM dapat mengerjakan tugasnya sesuai ketentuan dalam perusahaan.

Selain itu perspektif masyarakat pada umumnya masih bersifat konvensional dan masyarakat masih beranggapan perbankan syariah hanya dapat digunakan oleh orang yang beragama islam. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat menyebabkan hal tersebut terjadi, bahkan masih banyak masyarakat hingga kini yang belum paham mengenai akad yang terdapat dalam perbankan syariah sehingga perlu adanya sosialisasi yang dilakukan khususnya bagi pihak BSM Cabang Panakukang Makassar yang juga masih kurang melakukan edukasi kepada masyarakat.

⁷²Fahrul (40), *Nasabah Pembiayaan Pensiun, Makassar, Wawancara, 4 November 2020*

Tabel . 4.1

Analisis Kesesuaian Fatwa DSN MUI tentang Akad Murobahah dengan
Pembiayaan Pension BSM Cabang Panakukang Makassar

No.	Fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000	Pembiayaan Pension BSM cabang	Sesuai / Tidak Sesuai
1.	Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba (memenuhi rukun-rukun atau syarat akad yaitu penjual dan pembeli, objek <i>murabahah</i> dan ijab qabul)	Ketika proses pembiayaan pensionan, nasabah/konsumen berwajib untuk menemui pihak bank. Nasabah/konsumen harus menandatangani persetujuan yang telah disepakati dan dilihat pula oleh saksinya. Object yang disediakan bank ialah fasilitas bagi nasabah/konsumen dalam melakukan pembelian product tertentu yang sesuai dengan syariat islam.	Sesuai
2.	Komoditas yang diperjualbelikan tidak dilarang oleh syari'at Islam	Product financing untuk nasabah/konsumen pensionan yang dibolehkan ialah membeli atau merenovasi rumah, membeli kebutuhan usaha, membeli perabotan rumah tangga, membeli motor dan sebagainya	Sesuai
3.	Bank diperbolehkan membayar secara bertahap ataupun menyeluruh harga pembelian komoditas yang sudah disetujui kualifikasi-nya	Bank melakukan verifikasi seluruh data nasabah dan memberikan ketentuan maksimal pembiayaan yang sesuai dengan DSR nasabah lama permohonan. Apabila kedua belah pihak sepakat, selanjutnya bank akan menindaklanjuti pembuatan kontrak jual beli/murabahah	Sesuai

4.	Pembelian produk oleh pihak perbankan dibeli oleh nasabah atas nama pihak perbankan, dalam membeli produk tersebut harus sah serta terbebas dari bunga/riba	“Nasabah membeli sendiri barang yang diinginkan ke pemasok atas nama bank yang dibuktikan dengan surat kuasa, dimana surat tersebut menjelaskan bahwa bank memberikan kuasa kepada nasabah (mewakikan) untuk membeli barang atas nama bank.”	Sesuai
5.	Penjual (bank) diwajibkan menjelaskan seluruh hal yang berhubungan dengan pembelian komoditas, contohnya apabila pembelian dilakukan secara utang	Menjelaskan mengenai pembelian dalam akad murabahah dalam hal pembayaran, sudah tertera didalam perjanjian/akad. Meskipun sudah memberitahukan hal tersebut dengan nasabah.	Sesuai
6.	Bank kemudian menyerahkannya ke nasabah selaku pemesan dengan memberitahukan harga asli barang dan keuntungan yang diperoleh	Pihak perbankan harus jujur mengenai harga asli produk tersebut ke nasabah ditambah biaya pengeluarannya “Beberapa hal yang dijelaskan saat akad diantaranya terkait akad murabahah (definisi perjanjian pembiayaan murabahah, harga beli, margin, angsuran, biaya-biaya yang timbul), agunan, kewajiban nasabah, dan jeda janji apabila nasabah tidak melakukan pembayaran,”	Sesuai
7.	Pemesan (nasabah) berkewajiban melakukan pembayaran harga barang sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui	Pembayaran pembiayaan pensiun dilakukan secara angsuran (terdiri dari angsuran pokok dan <i>margin/ujrah</i>) yang dibayar melalui pemotongan manfaat pensiun setiap bulannya langsung dari rekening pensiun	Sesuai

		BSM nasabah dalam jangka waktu yang telah disepakati (maksimal 15 tahun).	
8.	Mencegah adanya cedera janji dan penyalahgunaan akad, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian khusus	Bank melakukan pembuatan perjanjian khusus disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak (bank dan nasabah)	Sesuai
9.	Apabila bank memberi kuasa nasabah untuk membeli barang kepada pihak pemasok, maka akad <i>murabahah</i> harus dilaksanakan setelah komoditas secara prinsip milik bank	BSM memberikan kuasa nasabah untuk membeli barang yang diinginkan atas nama BSM menggunakan pembiayaan yang disediakan oleh bank yang dibuktikan dengan pemberian surat kuasa. Pemasok (pihak ketiga) sesuai dengan yang ditunjuk atau setidaknya disetujui bank. Pemasok menyerahkan barang kepada nasabah dengan persetujuan bank	Tidak sesuai

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah pada produk pembiayaan dana pensiun di PT.Bank Syariah Mandiri, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi fatwa atau aturan dan ketentuan ini, seharusnya sudah sejalan dalam praktiknya pada perbankan syariah terkait produk-produknya yang diberikan kepada nasabah. Tapi pada praktiknya dilapangan sering terjadi, pegawai bank biasanya tidak memahami isi atau muatan dari fatwa, terkadang juga mencoba mencari titik temu antara fatwa dan produk-produknya.
2. Dalam melaksanakan fathwa DSN- MUI mengenai murobahah masih terdapat banyak masyarakat ataupun pihak perbankan yang kurang paham mengenai fathwa DSN- MUI. Konsumen yang ingin melakukan pembiayaanpun hanya sekedar tahu mengenai berapa persenan bunga yang akan diberikan kepadanya beserta angsuran-nya. Sehingga BSM pun dalam memberikan penjelasan kepada konsumen/nasabah hanya secara singkat sebatas pembiayaan murobahah saja

3. Persepsi masyarakat bersifat konvensional dan masyarakat hingga kini masih beranggapan bahwa hanya orang muslimlah yang bisa menggunakan product-product syariah padahal sifat bank syariah luas dapat dijangkau oleh semua pihak. Hal ini terjadi karena kurangnya edukasi yang dilakukan pihak bank kepada masyarakat secara luas

B. Saran

1. Diharapkan BSM Panakkukang dapat mengolah kembali process dalam melaksanakan akad murobahah agar tidak bertentangan/melanggar ketentuan yang ada pada fatwa DSN- MUI mengenai murobahah.
2. Diharapkan masyarakat dapat memahami secara mendalam tentang hal-hal yang terdapat dalam akad murobahah apabila melakukan pembiayaan dengan pihak perbankan. Masyarakat juga harus paham mengenai informasi-informasi yang terdapat pada akad agar tidak merugikan masyarakat
3. Pemerintah dan DSN- MUI hendaknya dapat melakukan edukasi kepada masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional BSM Panakkukang, terutama melakukan pelatihan pada karyawan di bank Syariah Mandiri Cabang Panakkukang Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwiah Rabiatul, *"Sistem jual beli obat golongan psikotropika narkotika dan precursor menurut perspektif Islam"*, Skripsi, Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam 2017
- A. Karim Adiwarman, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, cet.10*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Antonio M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung, Al-Mizan Publishing House, 2014.
- Dewi Hayuningtyas Pramesti dan Fenny Dewi Lestari, *Akuntansi Dana Pensiun Program Manfaat Pasti Terhadap Laporan Keuangan Studi Pada Dana Pensiun Bank Indonesia*, Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol.03.No.01, Januari, 2016
- Faisol Ahmad, dkk, *Pengembangan Sistem Informasi Dana Pensiun Pegawai Pada PT.Taspen Kantor Cabang Jember, Bytes, Vol.1, No.1*, 2012
- F.P Nussy Andika, *Analisis Penerapan PSAK NO. 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado*, Jurnal Emba Vol.2, Vol.4 Desember, 2014
- Hanifah Syifa, 2017, *Pembiayaan Pensiun Bsm*
<https://www.merdeka.com/uang/2016-pembiayaan-pensiun-syariah-bsm-capai-rp-144-triliun.html>
- H . Darmawati, *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah*, jurnal sulesana, Vol.XII, No.2, 2018, h.145
- Hudaefa Ninda Nashiha, *Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Minat Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Pensiun di Bsm Kc Ajibarang Banyumas*, Skripsi Purwokerto, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam purwokerto, 2019
- Indriastuti Maya, Ririh Dian Pratiwi, *"Perbandingan Pembiayaan Bermasalah Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional"*, jurnal Akuntansi, Vol. 6 No.1

- Indahsari Riska, Yuni Rosdiana, Rini Lestari, *Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Organisasi Pada Lembaga Perbankan Syariah di Kota Bandung*, Vol.19,No.1, Maret, 2018
- Kuncoro Mudrajad. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Ed.3. Jakarta, Erlangga, 2009.
- Mardian Sepky, *Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol.3, No.1,2015
- Maisyaroh Dina, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Mengajukan Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru*, Vol.2, No.1, Mei, 2019
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2002
- Moleong Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet.37, Bandung, Rosda, 2017
- Nofinawati, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, Vol.VIII, No.2, Juli-Desember 2014
- Prabowo Bagya Agung, *Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia*, jurnal Hukum Vol.16, No.1, Januari, 2009
- Rimadhani Mustika dan Osni Erza, *analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri periode 2008.01-2011.12*, media ekonomi Vol.19, No.1, April 2011
- Satiti Novita Ratna, *Optimalisasi Portofolio Investasi Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Malang*, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol.3,No.1,2013
- Semmawi Ramli, *Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam*, jurnal Al-Syir'ah, Vol.8, No.2, Desember 2010, h. 507
- Surahmat Winarno. *Dasar dan Teknik Riset*. Bandung, Tarsito, 1998
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Mixed Methods*, Bandung, Alfabeta, 2013
- Supriadi, *“Penetapan standar harga jual beli dalam konsep Ekonomi islam “*, Skripsi, Makassar:Fak.Ekonomi dan Bisnis Islam, 2013

Syaputra Ahmad Danu, *Cederanya Akad/Perjanjian Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, jurnal Syariah, Vol.V, No.1, April 2017

Tho'in Muhammad, *Larangan Riba dalam Teks dan Konteks*, jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 2, No.2, juli, 2016

Umam Khotibul, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016

Utami Ayu Hapsari Budi, dkk, *Penggunaan Metode projected unit credit dan entry age normal dalam pembiayaan pensiun*, Jurnal Gaussian, Vol.1, No.1, 2012.

Wulaningrum Puspita Dewi, Asirotn Nisa, *Praktik Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Vol.1, Vol.1

Yazid Afandi, M., *Fiqh Muammalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2009.

Yuliani Marifah, *Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah*, Dinamika penelitian, Media Komunika Sosial Keagamaan, Vol. 17, No. 2, November 2017.

Yuspin Wardah, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*, jurnal Ilmu Hukum, Vol.X, No.1, Maret 2007

Zuhdi Muhammad Harfin, *Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*, jurnal Ekonomi Syariah, Vol.VIII, No.2, Juni 2017, h.94

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

B. Pedoman Wawancara

LEMBAR WAWANCARA TERSTRUKTUR

INFORMAN : Pihak DSN-MUI Sebagai Informan Terkunci

NAMA INFORMAN : Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, M.M

UMUR : 54 TAHUN

PENGALAMAN : Anggota Bagian DSN-MUI

WAKTU WAWANCARA : 4 November 2020

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN INFORMAN	KESIMPULAN
1.	Bagaimana maksud Fatwa DSN MUI tentang Akad Murabahah?	Jadi fatwa itu kan ijma ulama tentang suatu hukum, lembaga keuangan syariah kan jaul beli prinsipnya dengan model murabahah. Murabahah ini kan sudah ditentukan ketentuan umumnya, ketentuan khususnya, dan bagaimana keputusannya. Jadi syariah yah itu tidak bertentangan karena itu sudah disepakati para ulama yang paham	Fatwa DSN MUI tentang Akad Murabahah tidak bertentangan dengan syariat kaena fatwa tersebut merupakan ijma ulama, dimana murabahah dalam hal ini sudah memiliki ketentuan umum dan khusus yang diatur dalam

		<p>tentang pakar produk itu . dan itu persetujuan dri mereka itulah namanya ijma. Dan kalau lembaga keuangan di bank syariah ada penyimpangan yah bkn fatwanya bermasalah, yang bermasalah itu yah orang atau lembaga yang menerapkan yang keliru . bias keliru karena yang pertama tidak tau karena tidak mau belajar, yang kedua komitmen untuk menerapkan masih lemah, yang ketiga karena kesulitan, semisal tidak mau repot, tidak praktis karena kan butuh rukun- rukun dan syarat terpenuhinya akad tentang murabahah itu. Kemudian tidak mau repot untuk melaksanakan . kemudian dpsnya tidak maksimal untuk mengawasi dan menegur tentang penerapan itu . sbnarnya kalau lembaga itu mematuhi terkait fatwa ini tidak ada masalah</p>	<p>fatwa DSN MUI. Hanya saja, kekeliruan terhadap pengaplikasiannya tidak bisa dipungkiri.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Cuma memang komitmen pengguna terkhusus perbankan syariah itu tidak memperhatikan . yah karena memang lembaga keuangan syariah itu banyak pegawai dan juga pimpinannya belum memahami benar itu konsepnya dia hanya mau praktisnya saja, jadi itu sebenarnya yg harus diluruskan.</p>	
2.	<p>Bagaimana kendala penerapan Fatwa DSN MUI tentang Akad Murabah?</p>	<p>Untuk kendala biasanya dia hanya mau praktisnya saja, misal pembelian barang dia hanya kasih uang saja berarti d wakalahkan kepada nasabah . jdi kan itu kemungkinan banyak terjadi penyimpangan. Misalnya dia tidak beli barang jdi transaksinya jual beli uang bkn barang itu kan termasuk riba. Uang yg berikan tidak semuanya dibelikan barang itu karena</p>	<p>Pihak Bank yang menerapkan akad murabahah ini hanya memperhatikan sisi kepraktisannya saja, serta sering terjadi kekeliruan dimana pihak bank memakai akad murabahah terlebih dahulu kemudian memakai akad wakalah padahal</p>

		<p>terkadang di cek tidak ada barangnya, jdi juga itu kesulitan . kan murabahah itu harus ada barang yg di beli atau misalnya dia wakalahkan nnti akad murabahahnya dilakukan pada saat barang sudah ada. Jdi d wakalahkan dulu silahkan beli barangnya nnti akad murabahahnya di buat setelah secara hokum barang itu ada . jdi itu biasa yang pihak bank tidak mau repot jdi dia Cuma anggap kalau dia punya uang 100 juta dia setarakan dengan nilai barang itu,memang akadnya murabahah tapi transaksinya bukan jual beli barang tapi jual beli uang . nah itu yang harus di ingatkan karena itu menyalahi aturan-aturan fatwa.</p> <p>Untuk pengawasannya, bank itu kan ada dpsnya Cuma kan kalau d</p>	<p>akad murabahah harusnya dilakukan saat barang sudahh menjadi milik bank secara prinsip.</p> <p>Pengawasan terhadap fatwa DSN MUI tentang Akad Murabahah</p>
3.	Bagaimana sistem pengawasan terhadap penerapan Fatwa DSN		

	<p>MUI tentang Akad Murabah?</p>	<p>perbankan itu bukan di cabang tapi di pusat sehingga kontrolnya susah mungkin jugabagian pengelola kurang kordinir atau kurang komunikasi. Jdi sebaiknya itu pengelolanya harus komitmen dengan aturan-aturan kemudian dpsnya juga harus lebih aktif untuk melihat itu. Jangan sampai dia hanya menjalankan saja tapi tidak melihat kenyatannya .</p>	<p>belum maksimal karena pengawasan yang dilakukan oleh DPS hanya berada di pusat dan belum menyentuh cabangnya.</p>
--	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEMBAR WAWANCARA TERSTRUKTUR

INFORMAN : Pegawai BSM Sebagai Informan Penguat

NAMA INFORMAN : Arif Wirabuana

UMUR : 45 TAHUN

PENGALAMAN : 17 TAHUN

WAKTU WAWANCARA : 24 Juli 2020

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN INFORMAN	KESIMPULAN
1.	Bagaimana menurut bapak tentang pembiayaan pensiun?	<p>pembiayaan diberikan kepada pensiun PNS yang sudah pensiun ataupun pensiun janda yang suaminya pensiun lalu meninggal dunia dan gajinya masuk ke ahli waris yang mau ke ahli waris yaitu istrinya, itu yang biasa diberikan pembiayaan dan pembiayaan pensiun itu bisa diberikan kepada pensiun taspen dan pensiunan yang sudah bekerja sama dengan BSM dalam arti dapennya seperti dapen mandiri, telkom sama lindo. Selain itu mengenai maksimal</p>	<p>Pembiayaan pensiun diperuntuhkan kepada para pensiunan PNS atau para ahli waris dengan maksimal pembiayaan 350.000.000 dengan jangka waktu 15 tahun.</p>

		<p>pembiayaannya itu bisa sampai Rp. 350.000.000 dengan jangka waktu maksimal sarannya itu 15 tahun dengan usia pada saat jatuh tempo 74 tahun.</p>	
2.	Sejak tahun berapa pembiayaan pensiun dilaksanakan ?	Sejak tahun 2016.	Sejak tahun 2016.
3.	Berapa jumlah nasabah pembiayaan pensiun ?	<p>Kalau nasabahnya cukup banyak, Cuma tunggu saya cek dulu di dataku. ada data terbaru. Kalau nasabahnya saya tidak tau cuman untuk apa ini, untuk cabang ini saja? kalau pembiayaanya sudah ada sudah sampai 18 milyar, tetapi tetap tumbuh, kalau untuk jumlah berapa yang pensiun banyak, biasa ada yang gaji lewat sini tapi tidak mengambil pembiayaan ada juga yang mengambil.</p>	Jumlah pembiayaan khusus pensiun sebesar 18 milyar.
4.	Bagaimana resiko yang dialami pihak bank	Pembiayaan pensiunan tentunya tidak dapat dihindarkan dengan yang namanya resiko baik itu	Resiko dari pembiayaan pensiun yaitu dengan melihat usia nasabah yang tidak lagi

	<p>selama menjalankan pembiayaan pensiun?</p>	<p>resiko yang ditanggung oleh nasabah, oleh pihak bank salah satunya dengan melihat umur nasabah yang akan diberikan pembiayaan yang tentunya sudah tidak termasuk dalam usia produktif dan rentan dengan masalah kesehatan, dan resiko selanjutnya yakni, banyak mafia-mafia yang menggunakan data pensiunan untuk disalahgunakan.</p>	<p>produktif yang rentan terkena penyakit serta banyaknya yang menyalahgunakan data pribadi para pensiun.</p>
5.	<p>Bagaimana proses pengajuan permohonan pembiayaan pensiun di BSM ini?</p>	<p>Pertama dengan mengajukan isi formulir, kemudian setelah disediakan cukup menyediakan data diri seperti ktp suami istri, npwp, kartu keluarga, dokumen legal seperti sk pensiun sama dia gaji harus dri bank syariah mandiri . tapi kalau belum pindah gaji kita gantikan dengan surat permohonan mutasi yang d tanda</p>	<p>Melengkapi data pribadi dan pengajuan formulir permohonan pembiayaan</p>

6.	Akad apa yang digunakan pada pembiayaan pensiun?	<p>tangani oleh nasabah, dan terakhir pas foto.</p> <p>Akad yang dipakai itu yakni akad murabah atau akad jual beli yang multiguna artinya bebas dipakai untuk keperluan apa saja selama itu masih halal, namun, jika nasabah mempunyai fasilitas di tempat lain itu memakai akad qarddan wajib dilunasi sebelumnya.</p>	<p>Pembiayaan pensiun menggunakan akad murabahah atau akad jual beli yang multiguna</p>
7.	Bagaimana menurut bapak Fatwa DSN-MUI tentang ketentuan umum pembiayaan murabahah?	<p>Maksudnya fatwa seperti apa saya kurang faham mengenai fatwa dsn-mui, bisa tolong dijelaskan isi fatwanya . kemudian saya membacakan fatwanya.</p> <p>Pada point 1, “bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba”. Akad murabahah ini bebas dari riba karena jangka waktu pembayaran cicilan tidak mempengaruhi total harga barang. Point 2 “barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah</p>	<p>Fatwa DSN-MUI terdiri 9 poin yang menjelaskan mengenai aturan untuk pembiayaan pensiun</p>

		<p>islam”. Untuk salah satu contoh barang yang diperjual belikan pada pembiayaan dana pensiun ini kendaraan bermotor dan survei yang dilakukan pihak bank untuk memastikan kondisi barang yang layak diperjualbelikan secara syariah . Point 3, “bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya”. BSM cabang panakkukang makassar memiliki standar terhadap kendaraan yang layak untuk dibiayai.</p> <p>Standarisasi tersebut dilihat dari tahun penjualan kendaraan tersebut. point 4” bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”. Untuk pengadaan kendaraan yang dibutuhkan nasabah, bank membeli kendaraan</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>tersebut atas nama bank sendiri dengan diwakilkan oleh nasabah adapun tujuannya agar nasabah lebih puas dengan pilihannya. Point 5 "bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang". Karena pembelian kendaraan diwakilkan oleh nasabah, dalam hal ini berarti nasabah yang harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Point 6 "bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual beli plus keutungannya". Kendaraan yang telah diberi tersebut kemudian ditentukan harga jualnya dengan perhitungan dari total harga beli di tabah margin yang telah disepakati. Point 7" nasabah membayar harga barang</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati”. jadi setelah harga jual kendaraan ditentukan dan besarnya angsuran telah disepakati maka nasabah membayar dengan jangka waktu sesuai kesepakatan. Point 8 ”untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah”. Jdi jika terjadi cedera janji maka pihak bank dapat melakukan penyelamatan sepihak sesuai dengan surat perjanjian murabahah yang telah disepakati kedua belah pihak. Point 9 ”jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Jdi</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>pada saat bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sendiri maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang tersebut menjadi milik bank secara prinsip.</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



LEMBAR WAWANCARA TERSTRUKTUR

INFORMAN : Nasabah Sebagai Informan Tambahan

NAMA INFORMAN : Bapak Supriadi

UMUR : 35 TAHUN

PENGALAMAN : 3 TAHUN

WAKTU WAWANCARA : 2 September 2020

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN INFORMAN	KESIMPULAN
1.	Bagaimana tanggapan mengenai pembiayaan pensiun yang ada di Bank Syariah Mandiri ini?	menurut saya pembiayaan ini bagus karena dapat meningkatkan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja.	Adanya rasa aman dan motivasi yang tinggi merupakan salah satu hal yang membuat nasabah yakin akan pembiayaan pensiun di BSM KCP Panakkukang.
2.	Prosedur apa saja yang Bapak harus siapkan untuk melakukan pengajuan pembiayaan pensiun?	kalau saya tidak salah ingat itu formulir asli permohonan pembiayaan beserta tanda tangan, sk pensiun, foto copy ktp, foto copy kk, foto copy	Berkas persyaratan berupa formulir asli pembiayaan, SK Pensiun, foto

		akte nikah, foto copy npwp dan pas foto.	copy KK, foto copy akte nikaah, foto copy NPWP dan pas foto.
3.	Bagaimana dengan akad yang dipakai dalam pembiayaan pensiun ini?	gak tau ibu saya yang paling penting yang saya ingat itu mengenai bunganya berapa angsuran yang harus saya bayarkan perbulannya, saya tidak paham mengenai akad yang digunakan dan pihak juga tidak menjelaskan, kan yang penting itu bunganya tidak besar dan pembiayaan saya diterima oleh bank. Masalah akad apa saya ikut saja ibu.	Nasabah tidak mengetahui dengan jelas tentang akad yang dipakai dalam pembiayaan pensiun karena pihak bank tidak menjelaskan secara rinci tentang akad-akad tersebut.
4.	Apa saja dampak positif yang bapak rasakan dalam pembiayaan pensiun ini?	Prosesnya yang mudah, dan memberikan rasa aman.	Salah satu dampak positif yang dirasakan nasabah adalah rasa aman dan prosesnya yang mudah.

LEMBAR WAWANCARA TERSTRUKTUR

INFORMAN : Nasabah Sebagai Informan Tambahan

NAMA INFORMAN : Bapak Fahrul

UMUR : 40 TAHUN

PENGALAMAN : 5 TAHUN

WAKTU WAWANCARA : 2 September 2020

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	JAWABAN INFORMAN	KESIMPULAN
1.	Bagaimana tanggapan mengenai pembiayaan pensiun yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Panakkukan Makassar?	Menurut saya mba, hampir sama sih dengan pembiayaan yang lain cuman inikan untuk para pensiunan, cuman di bank syariah ini dia lebih rendah sedikitlah biaya perbulannya yang harus dibayarkan selebihnya sama saja dengan bank- bank lain.	Hampir disetiap bank memiliki kesamaan tapi bank syariah lebih ringan biaya bulanannya.
2.	Prosedur apa saja yang Bapak harus siapkan untuk melakukan pengajuan pembiayaan pensiun?	Kalau kelengkapan berkasnya sih mba soal data pribadi yahhh kalau tidak salah itu formulir asli permohonan pembiayaan beserta tanda tangan, sk pensiun, foto copy	Berkas yang berkaitan dengan data pribadi seperti permohonan pembiayaan beserta tanda tangan, sk pensiun, foto

3.	<p>Bagaimana dengan akad yang dipakai dalam pembiayaan pensiun ini?</p>	<p>ktp, foto copy kk, foto copy akte nikah, foto copy npwp dan pas foto.</p> <p>Saya memilih di bank syariah karena pelayanan dari karyawan yang sangat memperhatikan kebutuhan nasabah selalu berusaha memberikan yang terbaik dan menjelaskan secara mendetail mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh nasabah itu kenapa saya memilih bank syariah mandiri di samping saya mencoba untuk mulai hijrah ke produk syariah.</p> <p>Saya memilih bank syariah karena saya tahu bahwa produk-produknya bebas dari riba, namun ketika saya melakukan pembiayaan ini pihak bank tidak menjelaskan secara rinci tentang penggunaan akad yang digunakan</p>	<p>copy ktp, foto copy kk, foto copy akte nikah, foto copy npwp dan pas foto.</p> <p>Pelayanan yang diberikan karyawan bank membuat nasabah merasa nyaman, serta merasa dimudahkan dalam setiap tahapan pembiayaan. Serta produk yang ditawarkan tidak mengandung riba.</p>
----	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.	<p>Apa saja dampak positif yang bapak rasakan dalam pembiayaan pensiun in?</p>	<p>dalam setiap produk-produknya, intinya ketika syarat pengajuan pembiayaan saya telah terpenuhi, saya melakukan akad dengan pihak bank tanpa tau jenis akad yang digunakan.</p> <p>Kalau soal dampak positif mba saya merasa lebih aman lah karena pembiayaan yang saya lakukan itu sudah masuk dalam kategori syariah yahhh jadi bukan hanya dunianya akhiratnya juga perlu diperhatikan, meskipun saya tidak begitu detail memahami tapi kan saya kira ada pihak-pihak yang harus mengawasi jadi merasa aman saja sih mba.</p>	<p>Adanya rasa aman yang diberikan oleh pihak bank.</p>
----	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

C. Dokumentasi





RIWAYAT HIDUP



Nur Fauziyyah Arisca lahir di Sungguminasa Kabupaten Soppeng pada tanggal 19 Januari 1998, dari Ayah yang bernama H. Muh Arisa S.Pd dan ibu bernama Hj. Cambali Palumeri, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Inpres Tinggimae tahun 2004 hingga tahun 2010. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar penulis lalu melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MtsN) Model makassar hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis lalu melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Makassar. Selama 3 tahun mengenyam pendidikan di MAN 2 Model Makassar.

Setelah itu penulis lalu melanjutkan studi di universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2016 dan mengambil jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam . penulis juga terlibat aktif dalam Organisasi intra kampus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi islam (HMJ-EI) dan Organisasi Ekstra Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)